

RENCANA KERJA

(R E N J A)

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

TAHUN 2023



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2023

HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA**

TAHUN 2023

Disusun Oleh :

TIM PENYUSUN

**RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**

TAHUN 2023

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal :

Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan

Sub Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan

RINAWATI HERI PRASTUTI, SE.MM

NIP. 19730501 199603 2 004

WAHYUNINGSIH,SH,MM

NIP. 19760726 200312 2 010

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN TEMANGGUNG

DWI SUKARMEI,ST,MT

Pembina

NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman RENJA tahun 2023. Renja disusun untuk menyesuaikan program dan kegiatan yang tertuang pada RKPD Tahun 2023, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja DPPPAPPKB Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPPAPPKB yang telah ditetapkan pada kondisi dan permasalahan yang ada, utamanya di tahun 2023 ini dalam rangka mewujudkan Visi dan misi Bupati Temanggung.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan untuk Renja DPPPAPPKB, terutama apabila dilakukan review atas Renja DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Renja DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 4 Juli 2023

KEPALA DPPPAPPKB

DRA. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si

NIP. 19611029 199002 2 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
LEMBAR VERIFIKASI.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL :	
Tabel I : 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan RENJA DPPPAPPKB tahun 2021.....	16
2.2 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, DPPPAPPKB.....	40
II : Tabel 1 Indek Pembangunan Gender (PG)	46
1.2 Indikator Pembangunan Gender (IPG).....	47
2.1 Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan....	48
2.2 Jumlah korban kekerasan Perempuan dan Anak korban kekerasan.....	49
3.1 Prevalensi Kasus kekerasan terhadap Anak Perempuan.....	51
3.2 Kasus kekerasan terhadap Anak dan Perempuan	53
4.1 Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Pemerintah.....	56
5.1 Persentase Desa sayung Ibu dan Bayi	58
5.2 Daftar desa yang mempunyai Satgas GSI	58
6 Persentase Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi	62
7 Kecamatan Layak Anak	63
8.1 Rasio PD yang menerapkan Responsiv Gender	64
8.2 PD yang menerapkan yang menerapkan penyusunan Responsiv Gender	66
9 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	72
10.1 Rasio kekerasan dsalam Rumah Tangga	73
10.2 Kekerasan dalam rumah tangga per Kecamatan	73
11 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	74
12 Pertumbuhan Penduduk	75
13 Persentase Penyediaan data Mikro Keluarga Desa/Kelurahan	76
14 Jumlah KK per kecamatan	77
15 Persentase pasangan Usia subur Unmeetneed	78
16 PUS Unmeetneed Kabupaten Temanggung	79
17 Persentase PUS yang istrinya dibawah 20 tahun	81
18 PUS dibawah Usia 20 tahun	82
19.1 Angka kelahiran Remaja usia 15 – 19 tahun	83
19.2 Data ASFR 15 – 19 tahun	84
20.1 Persentase PUS yang mempunyai Pengetahuan Pemahaman Jenis Kontrasepsi Modern	85
20.2 PUS yang mempunyai Pengetahuan pemahaman jenis Kontrasepsi Modern	86
21 Perkawinan Usia Anak	87

DAFTAR GAMBAR.....

BAB I PENDAHULUAN5

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan.....5

1.2. Landasan Hukum.....11

1.3. Maksud dan Tujuan13

1.4. Sistematika Penulisan13

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPPAPPKB SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2023.....15

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN137

BAB IV PENUTUP.....144

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

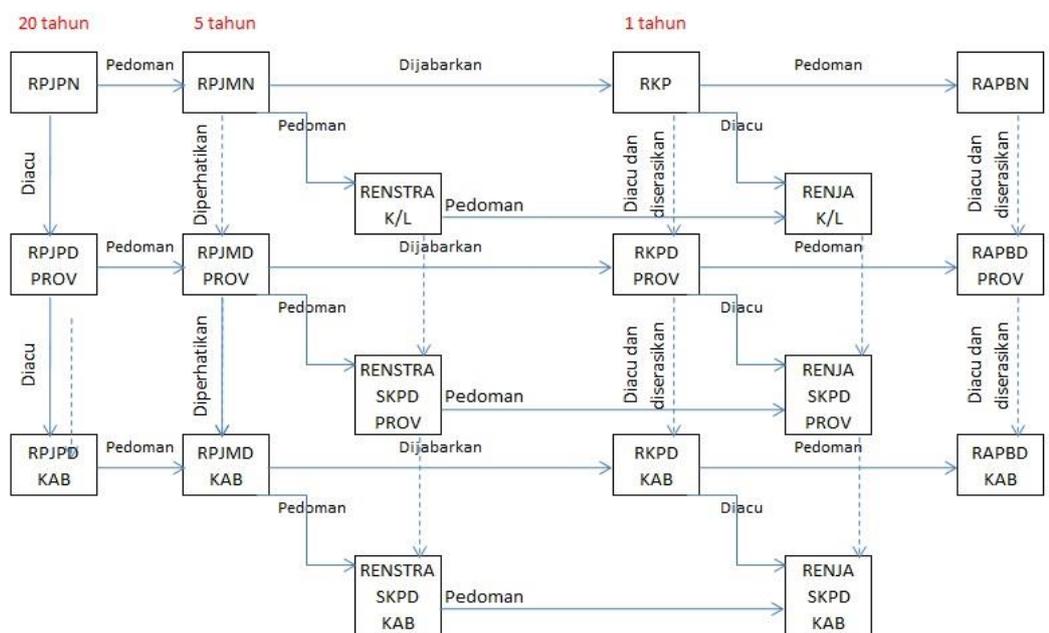
RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Perubahan renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan DPPAPPKB Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja DPPAPPKB Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja DPPAPPKB Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja DPPAPPKB, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKP. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis

kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal DPPPAPPKB , yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan DPPPAPPKB;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana DPPPAPPKB;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPPPAPPKB tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Perubahan renstra DPPPAPPKB;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan DPPPAPPKB;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan DPPPAPPKB;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan DPPPAPPKB; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan DPPPAPPKB.

b. Analisis gambaran pelayanan DPPPAPPKB ;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan DPPPAPPKB adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan DPPPAPPKB.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Perubahan renstra DPPPAPPKB) untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada DPPPAPPKB).

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPPPAPPKB tahun lalu berdasarkan Perubahan renstra DPPPAPPKB;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan DPPPAPPKB. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Perubahan renstra DPPPAPPKB dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan renstra DPPPAPPKB tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Perubahan renstra DPPPAPPKB;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Perubahan renstra DPPPAPPKB dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Perubahan renstra DPPPAPPKB sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB; Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPPPAPPKB tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Perubahan renstra DPPPAPPKB.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan DPPPAPPKB dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan DPPPAPPKB;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DPPPAPPKB;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan DPPPAPPKB;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk DPPPAPPKB.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan renstra DPPPAPPKB.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan

harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi DPPPAPPKB.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh DPPPAPPKB Namun dalam proses ini DPPPAPPKB mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh DPPPAPPKB terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja DPPPAPPKB;

Penyusunan dokumen rancangan Renja DPPPAPPKB merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja DPPPAPPKB;

Penyempurnaan rancangan Renja DPPPAPPKB perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja DPPPAPPKB dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja DPPPAPPKB dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja DPPPAPPKB yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja DPPPAPPKB untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPPAPPKB.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan DPPPAPPKB selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan DPPPAPPKB Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan DPPPAPPKB Tahun 2023; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) DPPPAPPKB Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPPAPPKB TAHUN
2021

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPPAPPKB TAHUN 2021****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPPAPPKB Tahun 2021 dan Capaian Perubahan renstra DPPPAPPKB Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja DPPPAPPKB Tahun 2021 terhadap capaian Perubahan renstra DPPPAPPKB Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan DPPPAPPKB Perangkat Daerah) sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2023.

Evaluasi terhadap capaian Perubahan renstra DPPPAPPKB Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Perubahan renstra DPPPAPPKB 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPAPPKB s.d Tahun 2021

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021		REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2021		CAPAIAN 2021		CAPAIAN s/d 2020 Rp	KET		
						I		II		III		IV									
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		28	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				13.367.037.868	11.815.362.505		1.060.047.215		1.945.906.293		2.625.598.588		3.756.679.934		9.394.613.530					
208.02.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			0	225.000.000	131.539.520	13	10.512.000	15	31.134.000	13	16.362.200	10	66.318.690	42	127.241.390	99,75	96,73			0
208.02.001	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			31	70.000.000	41.918.320	9	5.077.100	11	13.176.250	3		6	20.223.840	28	41.391.690	91,58	815,26			
		Persentase keterwakilan perempuan di lembaga Pemerintah	%	2,32			1,87		1,87		1,87		1,8		1,80		77,75				

		Rasio perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan dokumen perencanaan	%	38,57			45,65		45,65		45,65		82,66		82,61		100			
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				20.000.000	12.943.920	8,46	1.692.100	9,50	7.010.250	6	0	5	4.173.890	28,96	12.876.240	99,86	99,48		
208.02.001.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	keg	29	20.000.000	12.943.920	8,46	1.692.100	9,50	7.010.250	6	-	5	4.173.890	28,96	12.876.240	99,86	99,48		
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000	28.974.400	0,44	3.385.000	1,00	6.166.000	0,56	2.914.500	0,99	16.049.950	2,99	28.515.450	99,67	98,42		

2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlayannya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	keg	3	50.000.000	28.974.400	0,44	3.385.000	1,00	6.166.000	0,56	2.914.500	0,99	16.049.950	2,99	28.515.450	99,67	98,42		
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)	99,76			
																Predikat	Sangat Tinggi			
2:08:03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				30.000.000	28.100.000	1	0	3	0	3.5	10.714.600	2	15.435.900	13	26.150.500	0	93,06		
		Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak Perempuan	%	0,011			0,01		0,001		0,01		0,01		0,0100		100			
		Persentase Perempuan korban kekerasan	%	0,011			0,0037		0,004		0,0037		0		0,0018		100			
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			7	10.000.000	9.300.000	1	0	2	0	3	3.113.300	1	6.168.850	7,00	9.282.150	100	99,81		

2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlayannya Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	keg	7	10.000.000	9.300.000	1	0	2	0	3	3.113.300	1	6.168.850	7,00	9.282.150	100	99,81		
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				10.000.000	9.400.000	0,5	0	1	0	0,5	3.406.050	1	4.070.050	0	7.476.100	66,67	0		
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	keg	3	10.000.000	9.400.000	0,5	0	1		0,5	3.406.050	1	4.070.050	2,00	7.476.100	66,67	79,53		
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000	9.400.000	0	0	0	0	0	4.195.250	0	5.197.000	6,00	9.392.250	100	99,92		

2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	TerlaksananyaPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	keg	6	10.000.000	9.400.000	0	0	1	0	2	4.195.250	3	5.197.000	6,00	9.392.250	100	99,92			
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		88,89			
																Predikat		Tinggi			
2:08:04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				20.000.000	18.600.000	2	0	1	0	2	3.916.400	2	14.618.050	0	18.534.450	100	99,65			
		Persentase desa sayang ibu dan bayi		20,76			30,8		30,83		30,83		30,83		31,49		100				
		persentase rumah sakit sayang ibu dan bayi		100			100		100		100		100		100		100				
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000	18.600.000	0,00	0	1	0	2	3.916.400	2	14.618.050	0	18.534.450	100	99,65			

2.08.04.2.03.0 1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	keg	5	20.000.000	18.600.000	0,00	0	1,00		2	3.916.400	2	14.618.050	5,00	18.534.450	100	99,65		
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			
																Predikat	Sangat Tinggi			
2:08:06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				95.000.000	35.790.000	1	5.434.900	0	13.486.750	0	117.500	0	15.049.800	0	34.088.950	0	95,25		
		persentase terbentuknya kota layak anak		30			60,0 0		80,0 0		80,0 0		80		80,0 0		100			
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				45.000.000	15.790.000	2	5.434.900	3	8.805.250	0	419.000	3	1.000.000	7,8	15.659.150	97,5 0	99,17		

2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	keg	8	45.000.000	15.790.000	2	5.434.900	2,5	8.805.250	0,3	419.000	3	1.000.000	7,8	15.659.150	97,50	99,17		
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			5	50.000.000	20.000.000	0,5	0	0,5	0	2,50	4.380.000	-1,3	14.049.800	0	18.429.800	96,00	92,15		
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	keg	5	50.000.000	20.000.000	0,5	0	0,5	0	2,5	4.380.000	1,3	14.049.800	4,8	18.429.800	96,00	92,15		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	96,75			
Predikat																	Sangat Tinggi			
2:08:07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				10.000.000	7.131.200	0	0	0	4.471.000	0	1.613.700	0	991.100	1	7.075.800	100	99,22		
		Persentase anak korban kekerasan		0,012			0,04		0,005		0,009		0,009		0,005		100			

2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				0	7.131.200	0,4	0	0,4	4.471.000	0,19	1.613.700	0,01	991100	1,0	7.075.800	100	99,22		
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	keg	1		7.131.200	0,4	0	0,4	4.471.000	0,19	1.613.700	0,01	991100	1,0	7.075.800	100	99,22		
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			
																Predikat	Sangat Tinggi			
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				6.967.037.866	11.683.822.985	75	1.049.535.215	924	1.914.772.293	21	2.609.236.388	0	3.690.361.244	1.183	9.267.372.140		79,32		
2:14:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				4.312.901.166	3.764.444.185	3	884.510.094	13	1.095.584.243	15	861.568.472	11	827.016.437	0	3.668.679.246	75,49	97,46		0
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.614.060.166	3.151.673.646	3	761.560.717	4	962.410.787	4	692.311.242	3	676.239.629	14,00	3.092.522.375	100	98,12		

2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bula n	14	3.614.060.166	3.151.673.646	3	761.560.717	4	962.410.787	4	692.311.242	3	676.239.629	14,00	3.092.522.375	100	98,12		
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			12	76.161.000	33.391.201	3	5.908.890	3	6.855.320	3	16.221.947	3	3.940.000	12	32.926.157	100	98,61		0
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bula n	12	2.000.000	1.880.000	3	0	3	310.000	3	1.222.000	3	345.000	12,00	1.877.000	100	99,84		
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya Bahan Logistik Kantor	bula n	12	23.100.000	11.459.302	3	2.937.500	3	3.266.500	3	4.892.552	3	85.000	12,00	11.181.552	100	97,58		
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercukupinya Barang Cetak dan Penggandaan	bula n	12	9.820.000	6.060.725	3	1.219.750	3	1.573.300	3	1.999.675	3	1.260.000	12,00	6.052.725	100	99,87		
2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlayannya Kunjungan Tamu	bula n	12	15.491.000	6.548.374	3	1.751.640	3	1.455.520	3	3.283.200	3	0	12,00	6.490.360	100	99,11		
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bula n	12	25.750.000	7.442.800	3	0	3	250.000	3	4.824.520	3	2.250.000	12,00	7.324.520	100	98,41		
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12	508.430.000	498.579.338	3	112.245.487	3	116.270.136	3	115.662.803	3	122.617.308	12	466.795.734	100	93,63		
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	bula n	12	17.050.000	8.677.588	3	493.000	3	1.475.000	3	1.003.448	3	755.000	12,00	3.726.448	100	42,94		
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bula n	12	39.100.000	39.100.000	3	6.342.405	3	6.791.462	3	8.923.355	3	7.597.460	12,00	29.654.682	100	75,84		

2.14.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bula n	12	10.000.000	9.400.000	3	0	3	1.435.000	3	1.125.000	3	6.525.000	12,00	9.085.000	100	96,65		
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlayannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	bula n	12	442.280.000	441.401.750	3	105.410.082	3	106.568.674	3	104.611.000	3	107.739.848	12,00	424.329.604	100	96,13		
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				114.250.000	80.800.000	2,25	4.795.000	2,75	10.048.000	5,25	37.372.480	1,5	24.219.500	11,75	76.434.980	97,92	95,42		
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bula n	12	15.000.000	15.000.000	3	2.098.000	3	1.400.000	3	3.400.000	3	8.065.000	12	14.963.000	100	99,75		
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bula n	12	69.250.000	37.600.000	3	2.697.000	3	5.408.000	3	11.274.500	3	16.154.500	12	35.534.000	100	94,51		
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bula n	12	20.000.000	18.800.000	0	0	3	3.240.000	8	13.403.230	0	0	11	16.643.230	91,67	88,53		

2.14.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan	12	10.000.000	9.400.000	3	0	2	0	7	9.294.750	0	0	12	9.294.750	100	98,88		
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)	99,48			
																Predikat	Sangat Tinggi			
2:14:02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				480.000.000	70.027.000	3	7.997.300	6	32.690.900	6	15.397.500	5	7.459.110	6	67.011.810		95,69		
		persentase penyediaan data mikro keluarga di desa/kelurahan	%	100			100		100		100		100		100		100			
		persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/unmet need	%	9,83			13,4		13,04		12,65		12,99		12,99		67,16			
		Persentase Pasangan Usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	2,06			2,18		2,19		2,18		1,01		1,01		93,79			
		Angka kelahiran Remaja Usia 15 - 19 tahun (ASFR 15-19 th)		26,8			21,3		21,32		21,32		9,80		9,80		100			

2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			12	80.000.000	31.739.000	3	1.750.800	3	8.329.700	3	11.475.500	2	7.459.110	11	29.015.110	91,67	91,42		
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Rapat Pengendalian Program KKBPK	bulan	12	80.000.000	31.739.000	3	1.750.800	3	8.329.700	3	11.475.500	2	7459110	11	29.015.110	91,67	91,42		
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			12	400.000.000	38.288.000	3	6.246.500	3	24.361.200	3	3.922.000	3	0	12	37.996.700	91,00	90,18		
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	bulan	12	400.000.000	38.288.000	3	6.246.500	3	24.361.200	3	3.922.000	3	3467000	12	37.996.700	100	99,24		
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)	91,33	0,56		
																Predikat	Sangat Tinggi			
2:14:03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				2.139.136.700	6.283.257.300	73	157.027.821	914	744.506.950	0	1.324.462.016	0	2.403.017.847	1.182	4.629.014.634	67	73,67		

		Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern		75,57			82,53		82,74		82,41		75,29		82,81		100			
		Persentase kepesertaan KB aktif		75,57			75,03		75,07		75,56		75,29		75,07		99,34			
		Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		48,54			45,51		45,47		45,11		45,11		45,47		93,68			
		Persentase kampung KB yang memiliki Indeks Desa Membangun (IDM)		33,95			33,85		33,85		33,85		33,85		33,85		99,71			
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				1.555.000.000	1.374.318.000	2	149.293.221	10	193.700.050	0	165.443.116	0	387.420.897	2	895.857.284	90,42	65,19		0
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Terlaksananya Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	bulan	12	205.000.000	120.690.000	2,7	0	3	26.550.000	3,00	1.000.000	3	89.874.080	11,70	117.424.080	97,50	97,29		

2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	bulan	12	1.350.000.000	1.253.628.000	1,00	149.293.221	3,00	167.150.050	2,00	164.443.116	4	297.546.817	10,00	778.433.204	83,33	62,09		
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			3	43.000.000	1.417.200.000	1	0	1	270.900.000	0	601.614.750	0	526.522.500	2	1.399.037.250	87,50	98,72		0
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	bulan	12	43.000.000	30.000.000	3,00	0	3,00	0	3,00	6.614.750	0	6.122.500	9,00	12.737.250	75,00	42,46		
2,14,03,2,02,04	Penggerakan kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)	bulan	12		1.387.200.000	3,00	0	3,00	270.900.000	3,00	595.000.000	3	520.400.000	12,00	1.386.300.000	100	99,94		

2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			12	457.351.700	3.159.929.000	289	7.734.600	894	279.101.900	0	538.823.900	0	1.373.152.200	1.178	2.198.812.600	83,36	69,58		0
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terkendalinya Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	bulan	12	65.000.000	67.177.000	3,00	0	3,00	0	3,00	19.900.000	3	21.875.000	12,00	41.775.000	100	62,19		
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Tercapainya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	3520	392.351.700	1.831.035.000	289	7.734.600	1646	279.101.900	4,00	302.923.900	0	344.139.200	1939	933.899.600	55,09	51,00		
2,14,03,2,03,06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kegiatan	3		1.261.717.000		0	0,00		2,00	216.000.000	1	1.007.138.000	3	1.223.138.000	95,00	17,12		

2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			12	83.785.000	331.810.300	0	0	1	805.000	3	18.580.250	5	115.922.250	9	135.307.500	75,00	40,78		
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Terlaksananya Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	bulan	12	83.785.000	17.110.300	0,00	0	1,00	805.000	2,50	1.470.000	6	10.693.250	9,50	12.968.250	79,17	75,79		
2,14,03,2,04,03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	bulan	12		314.700.000	0,00	0	0,00	0	3,00	17.110.250	4	105.229.000	7,00	122.339.250	58,33	38,87		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	84,07			
Predikat																	Tinggi			
2:14:04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				35.000.000	1.566.094.500	0	0	0	41.990.200	0	407.808.400	0	452.867.850	0	902.666.450	0	57,64		
		Indeks pembangunan Keluarga		40			33,8		33,84		33,84		56		55,97		100,00			

2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				65.000.000	1.566.094.500		0		41.990.200		407.808.400		452.867.850		902.666.450			
2,14,04,2,01,02	Pengadaan sarana kelompokkegiata n ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPP KS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS) (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana)	TerlaksananyaP engadaan sarana kelompokkegiia tan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,P PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS) (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,Pengendal ian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Kegi a tan	2		280.000.000	0	0	0		2	264.250.000	0	0	2,00	264.250.000	100	94,38	

2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok	20	35.000.000	8.536.000	0	0	18	7.866.600	1	226.000	1	255.000	20,00	8.347.600	100	94,81		
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok	20	30.000.000	9.298.500	0	0	18	7.158.100	1	356.400	1	1.659.600	20	9.174.100	100	98,66		

2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPK S,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya Biaya Operasional bagi Kelompok kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,P PKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	bula n	12		1.268.260.000	0	0	2	26.965.500	3	142.976.000	4	450.953.250	9,00	620.894.750	75,00	48,96		
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)	93,75			
																Predikat	Sangat Tinggi			
JUMLAH				558	13.367.037.868	11.815.362.505	88	1.060.047.215	939	1.945.906.293	34	2.625.598.588	10	3.756.679.934	1.225	9.394.613.530				
																RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	94,89	79,51		
																PREDIKAT	Sangat Tinggi			
																RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH	98,26			
																PREDIKAT	sangat tinggi			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya																				

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Perubahan renstra DPPAPPKB Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DPPAPPKB di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan DPPAPPKB berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Capaian kinerja : 99,7 % dengan kategori, sangat tinggi
 - b. Program Perlindungan Perempuan

Capaian kinerja : 88,89 % , dengan kategori tinggi ,
 - c. Program peningkatan kualitas keluarga

Capaian kinerja : 100 % , dengan kategori memuaskan .
 - d. Program Pemenuhan Hak Anak /PHA)

Capaian kinerja : 96,75% , dengan kategori sangat tinggi
 - e. Program perlindungan khusus anak

Capaian kinerja : 100 % , dengan kategori memuaskan ,
 - f. Program pengendalian penduduk dan informasi keluarga

Capaian kinerja : 91,33 % , dengan kategori sangat tinggi
 - g. Program Pembinaan Keluarga Berencana /KB

Capaian kinerja : 84,07 % , dengan kategori tinggi
 - h. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Capaian kinerja : 93,75 % , dengan kategori sangat tinggi
 - i. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota

Capaian kinerja : 99,48 % , dengan kategori sangat tinggi
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

- c. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - e. Penggerakan kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)
 - f. Pengadaan sarana kelompokkegiatan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS) (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)
 - g. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - h. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
 - c. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
 - d. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
 - e. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut, adalah :

- Adanya perubahan pemetaan dan nomenklatur dalam SIPD , sesuai kemendagri yang berakibat kegiatan baru bisa dimulai dilaksanakan pada pada akhir semester 1 .
- Adanya kegiatan skala nasional yaitu PK21 , yang berakibat kegiatan dilini lapangan tidak bisa dioptimalkan
- Dikarena kan adanya PPKM , yang berakibat kegiatan pertemuan dan pelayanan KB tidak bisa dilaksanakan.

Dari beberapa permasalahan tersebut , berakibat beberapa target kinerja pelayanan DPPPAPPKB tidak bisa mencapai yang direncanakan , yaitu :

- Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed,yang perlu usaha keras dalam pencapaiannya .

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2021, maka dapat dikatakan bahwa DPPPAPPKB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Sangat baik** yaitu dengan nilai **93,26%**, Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk , dan
Capaian Kinerja : 80,49 % kategori Baik
2. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
Capaian Kinerja : 99,83 % kategori sangat baik

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2021 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perubahan renstra DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPPPAPPKB

2.2.1.Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan DPPPAPPKB dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah DPPAPPKB
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2021 (%)	Status
			2019	2020	2021	2023	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	94,55	95,63	95,64	95,64	95,65	95,10	95,62	95,31			99,64	AT
2	Persentase perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	0,015	0,14	0,004	0,004	0,004	0,009	0,008	0,002			100	TT
3	presentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	%	2,30	2,31	2,32	2,33	2,34	1,89	2,02	1,79			76,97	AT
4	Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	angka rasio	32,28	38,57	38,57	45,71	45,71	43,48	45,65	82,61			100	TT
5	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	%	26	25,9	0,011	0,011	0,011	0,014	0,022	0,0021			100	TT
6	Prosentase perempuan korban kekerasan	%	0,015	0,014	0,013	0,012	0,011	0,0002	0,0002	0,0013			100	TT
7	Persentase desa sayang ibu dan bayi	%			20,76	41,52	62,28	30,83	30,83	31,49			100	TT
8	Persentasre rumah sakit sayang ibu dan bayi	%			100	100	100	100	100	100			100	TT
9	Persentase terbentuknya kota layak anak	%	20	20	30	50	60	40	60	80			100	TT
10	Persentase anak korban kekerasan	%			0,012	0,011	0,011	0,04	0,04	0,0026			100	TT
11	Laju pertumbuhan penduduk	%	0,84	0,83	0,82	0,81	0,8	0,88	0,98	0,98			77,50	AT
12	Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kel.	%	100	100	100	100	100	100	100	100			100	TT
13	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed	%	6,9	6,83	9,83	9,51	9,17	11,44	13,76	12,99			58,38	UK
14	Presentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah	%	2,08	2,07	2,06	2,05	2,04			1,02			100	TT

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2021 (%)	Status
			2019	2020	2021	2023	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	94,55	95,63	95,64	95,64	95,65	95,10	95,62	95,31			99,64	AT
2	Persentase perempuan dan Anak Korban Kekerasan usia 20 tahun	%	0,015	0,14	0,004	0,004	0,004	0,009	0,008	0,002			100	TT
15	Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)	%	27,20	27,00	26,8	26,5	26,3	29,43	21,32	9,80			100	TT
16	presentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	%	85,10	86,28	75,57	75,87	76,21	83,03	82,61	75,29			98,79	AT
17	Persentase kepesertaan KB aktif	%	79,79	80,78	75,57	75,87	76,21	77,50	74,71	75,29			98,79	AT
18	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	%	49,45	49,65	48,54	48,87	49,19	48,02	45,38	45,21			91,91	AT
19	Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)	%	48,33	48,33	33,9	33,9	33,9	29,82	33,85	33,85			99,84	AT
20	Indek Pembangunan Keluarga				40	45	50	0,00	0,00	55,97			100	TT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 11 terdiri dari:

- a. Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan
 - 1) Faktor Pendorong Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas
 - 2) Faktor Penghambat Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas , Belum terbentuknya UPT PPPA
 - 3) Penguatan kapasitas pendampingan korban dan perluasan jejaring kerja penanganan
- b. Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif Gender dalam

Penyusunan Renja PD

 - 1) Faktor pendorong Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas
 - 2) Faktor Penghambat Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas , Belum terbentuknya UPT PPPA
 - 3) Penguatan kapasitas pendampingan korban dan perluasan jejaring kerja penanganan
- c. Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan
 - 1) Faktor Pendorong Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas
 - 2) Faktor Penghambat Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas dan pendamping.
- d. Prosentase perempuan korban kekerasan
 - 1) Faktor Pendorong Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas
 - 2) Faktor Penghambat Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas dan pendamping.
- e. Persentasre rumah sakit sayang ibu dan bayi
 - 1) Faktor Pendorong Peningkatan komitmen pemerintah dan kesaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan kematian ibu dan

- bayi, dengan mensosialisasi 3T dan 4 terlalu
- 2) Faktor Penghambat masih adanya budaya masyarakat bahwa kehamilan, dan melahirkan menjadi urusan perempuan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut penguatan dan advokasi dan sosialisitentang Kota Layak anak bersama mitra kerja
- f. Persentase terbentuknya kota layak anak
- 1) Faktor Pendorong Adanya Integrasi dengan program lain yang mendukung Kelana (Kecamatan layak anak)
 - 2) Faktor Penghambat Masih rendahnya pendampingan dalam pelaksanaan Kelana
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut penguatan dan advokasi dan sosialisitentang GSI bersama mitra kerja
- g. Persentase anak korban kekerasan
- 1) Faktor Pendorong Kerjasama berjejaring dalam pendampingan sehingga cakupan penanganan lebih luas
 - 2) Faktor Penghambat Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas dan pendamping
- h. Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kel.
- 1) Faktor Pendorong Adanya kegiatan Pendataan dan Up dating data keluarga
 - 2) Faktor Penghambat Lemahnya sistem pelaporan (RR) dan administrasi di tingkat RT
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut melakukan pendataan mikro keluarga Adanyan perda tentang pengendalian penduduk dan KB
- i. Presentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun
- 1) Faktor Pendorong
 1. Terintegrasinya kegiatan BKR (Bina keluarga Remaja) dan Pik (Pusat Informasi konseling) remaja
 2. Peningkatan kursus calon pengantin oleh lintas sektoral
 3. Pengembangan life skill bagi remaja dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga
 - 2) Faktor Penghambat Masih kurangnya SDM pengelola program KKBPK dilapangan dalam memberikan advokasi dan KIE pada masyarakat dan remaja .
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut Melakukakan promisi , KIE melalui

media cetak , Elektronik

- j. Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)
 - 1) Faktor Pendorong
 - 1. Pengembangan life skill bagi remaja
 - 2. Tingkat pendidikan wajar 12 tahun
 - 2) Faktor Penghambat Belum tersedianya data ASFR setiap tahun karena mulai tahun 2015 pendataan dilaksanakan 5 tahun sekali, untuk tahun 2020 belum bisa dilaksanakan pada tahun 2021 , dengan kegiatan PK21 yang telah mendapatkan data tersebut
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut Up dating data sebagai perhitungan ASFR
 - k. Indek Pembangunan Keluarga
 - 1) Faktor Pendorong Meningkatnya faktor Ekonomi, Sosial dan Pendidikan dalam keluarga
 - 2) Faktor Penghambat Masihnya lemahnya pemahaman keluarga tentang indikator peningkatan kesejahteraan keluarga
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut perlunya pemahaman tentang perhitungan IPK , karena perhitungan bukan wewenang PD
2. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 1 terdiri dari:
- a. Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/unmetneed
 - 1) Faktor Pendorong
 - 1. Meningkatnya Kegiatan KIE kepada PUS untuk Ber-KB
 - 2. Meningkatnya Koordinasi kepada KKB dalam pelayanan KB
 - 2) Faktor Penghambat
 - 1. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang pentingnya ikut KB
 - 2. Rendahnya pemahaman batasan PUS bisa hamil (merasa tua tidak perlu KB)
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut mengoptimalkan tim Advokasi KKBPK Peningkatan kapasitas pengelola program KKBPK dari tingkat RT sampai Desa , kecamatan dan Kabupaten

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada DPPPAPPKB terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dan Data Pokok Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Indek Pembangunan Gender (IPG)

Indek Pembangunan Gender (IPG) adalah suatu indeks yang mengukur pencapaian pembangunan kapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013)

Apa itu IPG :

- Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui pembangunan manusia
- IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM, yaitu harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan namun dengan memperhitungkan ketimpangan gender
- IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila angka IPG sama dengan IPM
- Apabila angka IPG lebih rendah dari IPM maka terjadi kesenjangan gender. Kesenjangan gender dapat dilihat dari selisih antara IPM dan IPG. Semakin kecil selisih antara IPM dan IPG maka dapat diartikan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan juga semakin kecil.

Untuk memperoleh angka Indek Pembangunan Gender dapat diperoleh dari perhitungan yang ada di BPS.

Ada beberapa indikator untuk mengukur IPG yang diantaranya meliputi

:

- Angka Harapan Hidup
- Harapan lama Sekolah
- Rata – rata lama Sekolah
- Penghasilan perkapita

IPG Kabupaten Temanggung selama 6 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Indek Pembangunan Gender
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indek Pembangunan Gender (IPG)	94,72	96,00	94,65	95,10	95,31	95,31

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2020

Dari tabel 1 bahwa IPG Kabupaten Temanggung tahun 2016 diperoleh angka sebesar 94,72, yang diperoleh dari perhitungan tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2017 sebesar 96,00, ada kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan untuk tahun 2018 pencapaian kabupaten temanggung sebesar 95,62 menurun dari tahun 2017. Namun pada angka tersebut pencapaian ini lebih tinggi dari IPG tingkat Nasional yang nilainya sebesar 91.03 dan lebih tinggi dari pencapaian tingkat propinsi Jawa tengah sebesar 91,95 %. Untuk tingkat propinsi berada pada rangking 2 se Jawa Tengah . Untuk pencapaian tahun 2019 tercapai 95,10 menurun lagi dari tahun 2018 dan pada tahun 2020 IPG Kabupaten Temanggung mencapai 95,31 ada kenaikan dari tahun sebelumnya , sedangkan pada tahun 2021 IPG Kabupaten Temanggung masih menggunakan perhitungan tahun 2020.

Tabel 1.2
Indikator IPG
Kabupaten Temanggung Tahun 2020

NO	Uraian	Angka Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata Rata Lama Sekolah		Penghasilan Perkapita	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Temanggung	73,62	77,38	12,05	12,28	7,20	6,72	10,70	8,635
2	Jawa Tengah	72,28	76,10	12,62	12,64	7,86	6,87	14,82	9,603

Sumber data BPS

Jika dilihat dari komposisi IPG yaitu Angka Harapan Hidup perempuan lebih tinggi yaitu 77,38 dibandingkan laki laki 73,62, sedangkan Angka Harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi yaitu 12,62 dibandingkan Angka Harapan lama sekolah laki laki yaitu 12,05, akan tetapi angka Rata rata lama sekolah laki laki lebih tinggi yaitu 7,20 dibandingkan perempuan yaitu 6,72 , sedangkan penghasilan perkapita laki laki lebih tinggi 10,70, dibandingkan dengan perempuan 8,635. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Untuk Pencapaian IPG tahun 2021 sampai pada Triwulan IV ,ini yang mendukung RPJMD kabupaten Temanggung , masih menggunakan perhitungan pada tahun 2020 sebesar 95,31

Dari pencapaian IPG tersebut ada beberapa faktor yang mendukung indikator tersebut , diantaranya adalah :

1. Faktor Pendorongnya adalah , tingginya Angka harapan hidup perempuan di Kabupaten Temanggung
2. Faktor Penghambat adalah , Masih rendahnya penghasilan Perempuan dan harapan lama sekolah bagi perempuan masih disparitas (perbedaan)

2. Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan

Perempuan dan anak korban kekerasan menurut Peraturan Menteri Negara PPPA No 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud perempuan dan anak korban kekerasan adalah setiap tindakan kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap perempuan dan atau anak. berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman tindakan tertentu pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang, dan perlakuan buruk lainnya yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi dalam beberapa bentuk, dan penanganan pun menurut dari bentuk-bentuk kekerasan yang mereka alami.

Rumus persentase perempuan dan anak korban kekerasan adalah jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor dan ditangani dibandingkan jumlah Perempuan dan Anak.

Di Kabupaten Temanggung tahun 2015 s.d 2021 Triwulan IV sebagaimana Tabel Berikut:

Tabel 2.1

Persentase Perempuan dan Anak korban kekerasan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Perempuan dan Anak korban kekerasan	39	45	24	48	42	11
2	Jumlah perempuan dan Anak	495.237	498.036	500.690	551.996	509.853	506.308
3	Persentase	0,0079	0,0090	0,0047	0,0094	0,008	0,002

Sumber : DPPKBPPA dan BPS tahun 2020

Dari tabel 2.2 presentase perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2016 mencapai angka 0.0079 , dan naik terus sampai dengan tahun 2017.pada dengan tahun 2018 cenderung turun menjadi 0,0047 Akan tetapi pada tahun 2019 naik kembali menjadi 0,0094 . untuk tahun 2020 turun menjadi 0,008 . berdasar pencapaian tahun lalu dari Triwulan 1 sampai Triwulan IV kasus semakin naik . hal ini juga terjadi di tahun 2020 , namun dibandingkan tahun sebelumnya pencapaian ini turun 0,0094%, untuk tahun 2021 Triwulan IV , ada kasus sebanyak 11 atau 0.002 %.

Tabel 2.2
Jumlah korban kekerasan Perempuan dan Anak
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	KDRT	1	4	5	13	9	3
2	Kekerasan terhadap anak		1			2	5
3.	Perkosaan	2	2			-	-
4.	Perbuatan tidak menyenangkan				1	7	-
5	Bullying/perundungan					2	-
6.	Pembuangan anak		2			1	-
7.	Penelantaran	5	5	3	6	1	-
8.	Perzinaan					-	-
9.	Kekerasan terhadap TKW					-	-
10.	Kekerasan dalam pacaran	3				1	-
11.	Pencurian (ABH)	6	7		4	9	-
12.	Sodomi				3	-	-
13.	Kekerasan seksual anak					-	
14.	Kekerasan seksual (disabel)				1	-	
15.	Pelecehan seksual	2	20		4	2	1
16.	Kekerasan Fisik	2				-	-

17.	Persetubuhan Anak	14		7	10	4	2
18.	Membawa lari anak	2				1	-
19.	Pencabulan				4	1	
20.	TPPO		2		1	2	-
21.	Bunuh diri anak				1	-	-
22.	Penganiayaan	2	4			-	
	JUMLAH	37	45	15	48	42	11

S

umber : Laporan tim P2TP2A (DPPKBPPPA, Dinas Sosial, PPA Polres, RSUD, WCC), tahun 2021

Jika dilihat berdasarkan jenis kekerasan sebagaimana tabel 4 terlihat beberapa kasus pada tahun 2021 Triwulan IV ini ada laporan kasus KDRT sebanyak 3 kasus , kekerasan terhadap anak 5 orang, pelecehan seksual dan persebutuhan anak.

Jumlah Kasus selalu fluktuatif karena sangat dipengaruhi oleh laporan dari korban atau pihak lain yang melaporkan kasus tersebut. Kasus kekerasan perempuan dan anak seperti fenomena gunung es, dimana yang melapor lebih sedikit dibandingkan yang tidak melapor. Hal ini karena banyak yang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib jika dilaporkan.

Kasus-kasus yang disajikan seperti tersebut diatas telah mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan, yang meliputi layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial. Layanan diberikan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan kebutuhan korban. Penanganan kasus tersebut baru dilakukan oleh lembaga dalam jejaring Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di Kecamatan.

Dari analisa kasus diatas dapat dijadikan referensi bersama bahwa upaya pencegahan berupa sosialisasi, edukasi, penyuluhan dan peningkatan kapasitas lembaga penanganan untuk lebih ditingkatkan. Namun demikian hal ini juga ada beberapa faktor penghambat dalam penanganannya , diantaranya adalah

,keterbatasannya dan kemampuan pendamping , dan belum terbentuknya UPT PPPA di kabupaten Temanggung.

3. Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan

Kasus kekerasan terhadap anak perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan anak perempuan secara seksual, psikologis,dan/atau penelantaran, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang, dan perlakuan buruk lainnya yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Rumus kasus kekerasan terhadap anak perempuan yang diadakan dan ditangani dibandingkan dengan jumlah anak perempuan dikalikan 100% .

Tabel 3.1

Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kekerasan terhadap anak perempuan yang melapor dan ditangani	39	43	15	16	24	5
2	Jumlah anak perempuan	114.133	113.739	113.222	111.545	111.545	232.967
3	Persentase	0,034	0,039	0,013	0,014	0,022	0,0021

Sumber DPPKBPPA tahun 2021

Dari tabel 3.1 terlihat semua kasus yang melapor telah tertangani sesuai dengan Standar Operasional Persedur. Jumlah seluruh kasus yang terjadi pada perempuan dan anak dari tahun 2016 semakin naik pada tahun 2017 , dan pada tahun 2018 menurun namun pada tahun 2019 naik kembali , pada tahun 2020 angka naik mencapai 0,22,dan pada tahun 2021 sampai tribulan IV turun menjadi 0,0021 , hal ini sudah ada penurunan dari tahun 2020. Adapun kasus yang mnimpa

perempuan dan anak perempuan dikabupaten Temanggung pada TW IV tahun 2021 tersebar di 12 kecamatan , yaitu:,Temanggung, Tembarak ,Selompampang, Kranggan, Bejen Parakan,ngadirejo dan Bulu (tabel 6),sedangkan sampai dengan Tri Wulan IV tahun 2021 ada 5 kasus yang tertangani sesuai standar pelayanan minimal.

Tabel 3.2
Kasus Kekerasan terhadap anak dan Perempuan

	Jenis Kasua	KECAMATAN																			2021	
		Temanggung	Tembarak	Selopampang	Pringsurat	Kranggan	Kaloran	Kandangan	Bulu	Kedu	Tlogomulyo	Parakan	Bansari	Kledung	Jumo	Gemawang	Ngadirejo	Candirotto	Bejen	Wonobojo		Tretep
1	KDRT	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2	Kekerasan terhadap anak/Penganiayaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Perkosaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Perbuatan tidak menyenangkan/Trauma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bullying/Perundungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Pembuangan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Penelantaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Perzinaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kekerasan terhadap TKW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kekerasan dalam Pacaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	(ABH)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sodomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kekerasan seksual Anak	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5
14	Kekerasan Seksual (disabil)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pelecehan Seksual	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

16	Kekerasan fisik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Persetubuhan Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
118	Membawa Lari anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Pencabulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	TPPO/Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Bunuh diri Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Penganiayaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	1	1	2	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	11

4. Persentase keterwakilan perempuan di Lembaga Pemerintah

Salah satu ukuran kontribusi perempuan dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan keluarga adalah partisipasi angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan dapat dilihat dari jumlah semua angkatan kerja perempuan baik disektor swasta maupun sektor pemerintah .

Sedangkan definisi dari keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah adalah besarnya jumlah perempuan yang bekerja pada sektor pemerintah.

Rumus : jumlah keterwakilan perempuan dilembaga pemerintah dibanding jumlah perempuan pada angkatan kerja kali 100 %.

Partisipasi angkatan kerja perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2021 sampai triwulan IV sebanyak 1,80 %

Tabel 4.1

Persentase keterwakilan Perempuan dilembaga pemerintah

Kabupaten Temanggung Tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perempuan di lembaga pemerintah	4.099	4.216	4.508	3.711	3.536	3.349
2	Jumlah angkatan kerja perempuan	193.193	196.600	182.753	196.675	174.643	187.543
	Persentase	2,12	2,14	2,46	1,88	2,02	1,80

Sumber : DPPKBPPPA tahun 2020

Dari tabel diatas keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah di kabupaten Temanggung naik dari tahun 2016 sampai 2017 dari angka 2,12 ke 2,14 pada tahun 2018 naik kembali yaitu dari angka 2,14 tahun 2017 menjadi 2,46, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu dari angka 2,46 menjadi 1,88, disebabkan pensiun/purna bagi ASN perempuan. dan pada tahun 2020 Triwulan IV persentasenya ada kenaikan sedikit dibanding tahun 2019, sementara untuk laporan sampai tahun 2021 TW IV ini sebesar 1,80 %

Untuk jumlah perempuan dilembaga pemerintah angka menurun dari tahun 2019 dibandingkan tahun 2020 Triwulan IV dari 3.711 menjadi 3.536 dan sampai pada saat ini TW IV tahun 2021 ada penurunan yaitu 3.349 dikarenakan jumlah angkatan kerja yang dapat terserap di lembaga

pemerintahan turun secara nasional dikarenakan efisiensi SDM secara Nasional,serta banyak ASN Perempuan yang telah Purna (Pensiun).

Tabel 4.2
Keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah
Kabupaten Temanggung tahun 2021 sampai Triwulan IV

NO	NAMA OPD	LAKI -LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	Sekretaris Daerah	75	40	115	34,78
2	Sekretaris DPRD	17	8	25	32,00
3	BAPPEDA	15	20	35	57,14
4	BKPSDM	20	14	34	41,18
5	DINPERMADES	14	11	25	44,00
6	Inspektorat	14	19	33	57,58
7	DPRKPLH	107	40	147	27,21
8	RSUD	106	230	336	68,45
9	DPPPAPPKB	14	12	26	46,15
10	Dinkominfo	21	6	27	22,22
11	BPBD	8	3	11	27,27
12	Dindukcapil	12	12	24	50,00
13	Dinkes	169	680	849	80,09
14	BPPKAD	29	19	48	39,58
15	Dindikpora	1.136	1.913	3.049	62,74
16	Dishub	44	2	46	4,35
17	Disperindagkop UMKM	88	18	106	16,98
18	Dintan Pangan	77	74	151	49,01
19	Dinsos	16	12	28	42,86
20	Disnaker	25	16	41	39,02
21	DPU	92	22	114	19,30
22	Dinnakar	18	8	26	30,77
23	Dinbudpar	12	17	29	58,62
24	Dinarpus	10	10	20	50,00
25	Kesbangpol	46	6	52	11,54
26	Satpol PP Damkar	13	10	23	43,48
27	Sek KPU	15	3	18	16,67
28	DPMPTSP	9	3	12	25,00
29	Kec.Bansari	7	7	14	50,00

30	Kec.Bejen	13	4	17	23,53
31	Kec.Bulu	12	1	13	7,69
32	Kec.Candiroto	12	5	17	29,41
33	Kec.Gemawang	9	5	14	35,71
34	Kec.Jumo	12	4	16	25,00
35	Kec.Kaloran	7	8	15	53,33
36	Kec.Kandangan	11	5	16	31,25
37	Kec.Kedu	16	7	23	30,43
38	Kec.Kledung	17	6	23	26,09
39	Kec.Kranggan	25	6	31	19,35
40	Kec.Ngadirejo	15	5	20	25,00
41	Kec.Parakan	16	3	19	15,79
42	Kec.Pringsurat	81	40	121	33,06
43	Kec.Selopampang	8	5	13	38,46
44	Kec.Temanggung	10	3	13	23,08
45	Kec.Tembarak	12	1	13	7,69
46	Kec.Tlogomulyo	10	6	16	37,50
47	Kec.Tretep	75	40	13	34,78
48	Kec.Wonobojo	17	8	17	32,00
	Jumlah	5.867	3.349	2518	57,08

Dari tabel diatas , jumlah ASN perempuan dibandingkan laki laki di kabupaten Temanggung lebih besar perempuan , hal ini sudah menunjukkan peningkatan . keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintah.

5. Persentase desa sayang ibu dan bayi

Salah satu upaya Pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan adalah dengan Gerakan Sayang Ibu (GSI). Gerakan Sayang Ibu (GSI) merupakan **gerakan** percepatan penurunan angka kematian **ibu** dan bayi yang dilaksanakan bersama-sama. Yakni, antara pemerintah dan masyarakat untuk lebih meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian terhadap kesehatan **ibu** dan bayi.

Adapun Rumus dari GSI Adalah jumlah desa yang telah memiliki satgas gerakan sayang ibu dan bayi dibanding jumlah desa yang ada dikalikan 100 %

Tabel 5.1

Persentase Desa sayang ibu dan bayi

Kabupaten Temanggung tahun 2021 sampai Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa sayang ibu dan bayi	30	50	62	82	82	91
2	Jumlah desa	289	289	289	289	289	289
	Persentase	10,38	17,30	21,45	28,37	28,37	31,49

Sumber : dppappkb tahun 2021

Dari tabel diatas , jumlah desa yang sudah mempunyai satgas GSI , dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 sejumlah 91 desa / 31, 49% dari jumlah desa sebanyak 289. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menurunkan AKB dan AKI, diantaranya adalah dengan integrasi kegiatan yang ada ditingkat desa, yaitu desa Siaga dan memaksimalkan FKD /Forum Kesehatan Desa . adapun desa yang sudah mempunyai satgas GSI ,adalah seperti yang ada ditabel berikut ini :

TABEL 5.2

Daftar Desa yang mempunyai satgas GSI

Kabupaten Temanggung tahun 2021 sampai Triwulan IV

N0	Desa	Kecamatan	Tahun dibentuk satgas						
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Mojosari	Bansari					v		
2	Candisari					v			
3	Bansari				v				
4	Tanurejo			v					
5	Prangkoan	Bejen	v						
6	Jlegong			v					
7	Selosabrang				v				
8	Lowungu				v				
9	Larangan luwok					v			
10	Bulu	Bulu			v				

11	Mondoretno			V					
12	Pakurejo						v		
13	Krawitan	Candirototo	V						
14	Ngabean			V					
15	Kentengsari					v			
16	Muntung						v		
17	Plosogaden							v	
18	Ngadisepi	Gemawang		V					
19	Banaran					v			
20	Kemiriombo						v		
21	Jambon							v	
22	Gedongsari	jumo				v			
23	Jombor						v		
24	Gedongsari							v	
25	Desa Kertosari								V
26	Ketitang								V
27	Kemiri	Kaloran				v			
28	Kwarakan						v		
29	Getas								V
30	Kedungngumpul	Kandangan		V					
31	Kandangan					v			
32	Gesing						v		
33	Ngemplak							v	
34	Tlogopucang								V
35	Gondangwayang	Kedu	v						
36	Karangtejo			V					
37	Kundisari					v			
38	Salamsar						v		
39	Tegalsari							v	
40	Candimulya								V
41	Jeketro	Kledung		V					
42	Kalirejo		v						

43	Kledung				v				
44	Kwadungan Jurang						v		

N0	Desa	Kecamatan	Tahun dibentuk satgas							
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
45	Tlahap								V	
46	Nguwet	Kranggan			v					
47	Pare			V						
48	Purwosari							v		
49	Klepu								V	
50	Campursari	Ngadirejo		V						
51	Gondang wetan							v		
52	Gondangwinangun		V							
53	Pringapus								V	
54	Caturanom	Parakan			v					
55	Depokharjo							v		
56	Mandisari								V	
57	Parakan wetan			V						
58	Traji						v			
59	Gowak	Pringsurat								
60	Klepu							v		
61	Kupen						v			
62	Rejosari				v					
63	Bulan	Selopampang		V				v		
64	Gambasan						v			
65	Selopampang				v					
66	Kowangan	Temanggung		V						
67	Mudal						v			
68	Gilingsari								V	
69	Guntur				v					
70	Lungge							v		
71	Drono	Tembarak						v		

72	Kemloko			V					
77	Menggoro							V	
78	Purwadadi					v			
78	Tawang Sari				v				
79	Candissari	Tlogomulyo						V	
80	Langgeng				v				
81	Pagersari						v		
82	Bendungan	Tretep					v		
83	Bojong				v				
84	Donorejo					v			
85	Sigedong			V					
86	Simpar		V						
87	Tlogomulyo							V	
88	Kebonsari	Wonoboyo		V					
89	Semen						v		
90	Wates				v				
91	Wonoboyo			V					

Sumber : dppappkb tahun 2021

Dari tabel diatas dari jumlah 289 Desa , yang sudah dievaluasi dan telah mempunyai SK Satgas GSI , Sebanyak 91 desa sejak tahun 2015 sampai tahun 2021

6. Persentase Rumah sakit sayang ibu dan bayi

Salah satu upaya Pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan adalah dengan Gerakan Sayang Ibu (GSI). Dalam rangka mendukung suksesnya gerakan tersebut ,selain peran serta masyarakat , juga peran serta pelayanan kesehatan .

Rumus persentase Rumah sakit sayang ibu dan bayi:

- Jumlah Rumah sakit sayang ibu dan bayi dibagi jumlah rumah sakit yang ada dikalikan 100 %

Adapun prosentase rumah sakit sayang ibu dan bayi di kabupaten Temanggung pada tahun 2021 adalah :

Tabel 6
Persentase Rumah sakit sayang ibu dan bayi

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rumah sakit sayang ibu dan bayi	0	0	0	0	0	4
2	Jumlah rumah sakit	0	0	0	0	0	4
3	Persentase	0	0	0	0	0	100%

Sumber :dppappkb tahun 2021

Dari tabel diatas , Rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan yang mendukung gerakan sayang ibu dan anak di kabupaten Temanggung pencapaiannya 100 % , karena dari semua Rumah sakit yang ada di Kabupaten Temanggung, semua melayani dan peduli akan kesehatan ibu dan bayi dalam rangka menurunkan AKB dan AKI ,

7. Persentase terbentuknya kecamatan layak anak

Kecamatan layak anak menurut Permen PPPA Nomor 11 tahun 2011 adalah sistem pembangunan di tingkat kecamatan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah kecamatan, masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan yang telah terbentuk gugus tugas dan melakukan pengarusutamaan hak anak.

Indikator-indikator Kecamatan Layak Anak minimal memuat 5 cluster hak anak yaitu:

1. Hak Sipil dan kebebasan lingkungan keluarga
2. Pengasuhan Alternatif
3. Kesehatan dasar dan Kesejahteraan
4. Pendidikan .Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya
5. Perlindungan khusus

Rumus Presentase Kecamatan layak anak adalah jumlah kecamatan layak anak dibandingkan dengan jumlah kecamatan yang ada dalam satu kabupaten X 100%.

Jumlah kecamatan layak anak di Kabupaten Temanggung tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV sebagaimana tersebut pada

Tabel 7.1**Kecamatan Layak Anak Kabupaten Temanggung
Tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV**

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kecamatan layak Anak	0	0	4	8	12	16
2	Jumlah Kecamatan	20	20	20	20	20	20
3	Persentase	20 %	20%	20 %	40%	60%	80%

Sumber DPPKBPPPA

Hingga saat ini sudah ada 16 kecamatan dan 12 desa/kelurahan rintisan layak anak yang terbentuk, yaitu kecamatan Kranggan, Temanggung, Kedu Ngadirejo, Gemawang, Selopampang, Parakan, Kaloran, Tembarak, Jumo, Pringsurat, Bulu { yang belum tretep. Wonoboyo. Kledung, bejen} dan 8 Kelurahan yaitu Temanggung I, Temanggung II, Butuh, Banyuurip, Kowangan, Jampirejo, Jampiroso dan Kertosari. Pada tahun 2020 kegiatan Kecamatan dan kelurahan/desa layak Anak sifatnya adalah pembinaan dan pengembangan dalam kegiatan kecamatan, desa/kelurahan layak anak, bersama lintas sektoral. Pembentukan rintisan kelurahan layak anak tersebut didasarkan pada pemilikan sarana prasarana baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan indikator desa/ kelurahan layak anak. Sedangkan 12 kecamatan sebagai rintisan pun didasarkan dengan adanya beberapa indikator kecamatan layak anak, dengan adanya indikator tersebut akan kita temukan beberapa hambatan dan masalah yang pada dasarnya adalah merupakan temuan yang harus di selesaikan. Adapapun faktor pendorong dan penghambatnya adalah sebagai berikut;

1. Adanya Integrasi dengan program lain yang mendukung Kelana (Kecamatan layak anak).
2. Faktor Penghambatnya adalah Masih rendahnya pendampingan dalam pelaksanaan Kelana (Kecamatan Layak Anak).
3. Belum semua ditingkat Kecamatan terbentuk Forum Anak.

8. Rasio Perangkat Daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja SKPD

Perencanaan responsif Gender menurut Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, pasal 1, bahwa perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki laki.

Salah satu ukuran kontribusi Perempuan dalam merencanakan proses pembangunan, yaitu Perencanaan Pembangunan dengan mempertimbangkan 4 aspek yaitu:

1. Akses
2. Partisipatif
3. Control, dan
4. Manfaat yang setara bagi laki laki dan perempuan

Dengan mengintegrasikan Aspirasi Kebutuhan permasalahan laki laki dan perempuan ke dalam perencanaan PUG, didasarkan kepada hasil analisis gender yang menggunakan data terpilah / statistik gender. Untuk menyusun Anggaran Responsif Gender (ARG) digunakan Analisa Gender yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan pembangunan

Rumus perhitungan Rasio PD yang menerapkan kebijakan Responsif Gender dalam penyusunan Renja SKPD adalah jumlah PD yang menerapkan ARG dibandingkan jumlah PD dikalikan 100%.

Tabel 8.1

**Rasio PD yang menerapkan kebijakan Responsif Gender
dalam penyusunan Renja SKPD Kabupaten Temanggung
Tahun 2016 s.d 2021 triwulan IV**

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PD yang menerapkan ARG	N/A	23	23	20	21	38
2	Jumlah PD	N/A	46	46	48	48	46
	Persentase		N/A	N/A	50,00	41,67	82,61

Sumber DPPKBPPA

Perangkat Daerah yang menerapkan Anggaran responsif Gender pada tahun 2018 sejumlah 23 PD, dan pada tahun 2019 yang melaporkan sejumlah 20 ada penurunan 3 PD, hal. Pada tahun 2020 ada peningkatan menjadi 22 PD, hal ini juga adanya lintas sektoral antar PD sebagai hasil rewiuw Inspektorat dalam pembuatan RKA tahun 2021 yang dilaksanakan tahun 2020. Namun pada tahun 2021, yang melaporkan ada 38 PD, dari jumlah 46 PD yang dilatih pada tahun tersebut. Adapun daftar OPD yang menerpkan ARG sebagai mana dalam tabel berikut :

Tabel 8.2

**PD yang menerapkan kebijakan Responsif Gender
dalam penyusunan Renja SKPD Kabupaten Temanggung
Tahun 2021 triwulan IV**

**REKAPITULASI ANGGARAN RESPONSIF GENDER
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021**

NO	NAMA OPD	TAHUN 2021		
		PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	DINPERMADES	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PERENCANAAN, EVALUASI, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DESA	PENGUATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN	Rp 59.961.000
		PROGRAM PENGEMBANAGAN LEMBAGA EKONOMI MASYARAKAT/DESA DAN PERBERDAYAAN KAWASAN PERDESAAN	PENINGKATAN DAN PENGEMBANAGAN LEMBAGA USAHA EKONOMI MASYARAKAT	Rp 37.231.600
2	DINDUK CAPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUKPELAPORAN KEPENDUDUKAN	PENERBITAN DOKUMEN ATAS HASIL PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN	Rp 100.000.000
3	DKUKMP	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PENINGKATAN PRODUKTIFITAS, NILAI TAMBAH AKSES PASAR, AKSES PEMBIAYAA, PENGUATAN KELEMBAGAAN	Rp 47.658.000
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PEMBERDAYAAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 108.980.000
		PROGRAM STANDARLISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL BERUPA TERA, TERA ULANG	Rp 65.000.000
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN PROVENSI	Rp 86.248.800
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAKA KECIL DAN USAHA MIKRO	PENDATAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	Rp 50.000.000

		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayaaahan Industri	Rp 50.000.000
4	DINPERINAker	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	KONSULTASI PRODUKTIFITAS PADA PERUSAHAAN KECIL	Rp 50.000.000
			PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BERBASIS KOMPETENSI BAGI Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp 507.875.000
			PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	Rp 368.539.014
5	BPBD	PROGRAM Pencegahan dan Kesiapsiagaan	RINTISAN DESA TANGGUH BENCANA	Rp 100.000.000
6	SETDA	PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	FASILITASI PENGELOLAAN KESRA DAN BINTAL	Rp 300.000.000
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Rp 100.000.000
7	DINPUSIP	PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN	PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN RUJUKAN TINGKAT KAB/KOTA	Rp 250.000.000
8	BKPSDM	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	Rp 119.000.000
9	KESBANGPOL	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	FASILITASI PEMBINAAN DAN MONITORING ORMAS UKP, LDSM	Rp 36.600.000
10	DPPPAPPKB	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PENYEDIAAN LAYANAN BAGI KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA	Rp 18.600.000

			DALAM DAERAH KAB/KOTA	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KAB/KOTA	Rp 12.943.920
11	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KAB/KOTA	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Rp 22.559.900
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Rp 20.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWAS	PENYELENGGARAAN PENGAWAS INTERNAL	Rp 79.401.100
12	BAPPEDA	PROGRAM PERENCANAAN , PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	Rp 650.000.000
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 200.000.000
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	FASILITAS DAN MONEV PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN BIDANG EKONOMI KREKTIF	Rp 150.000.000
			KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	Rp 50.000.000
13	DKPPP	PROGRAM PENGEMBANGAN UNGGAS	PENGEMBANGAN UNGGAS DI PEDESAAN	R 475.057.400
14	DPM	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KAB/KOTA	Rp 10.000.000

15	DINSOS	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	FASILITASI PEMBERDAYAAN EKONOMI PRODUKTIF BAGI KELUARGA MISKIN	Rp 72.250.800
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KAB/KOTA	Rp 26.400.000
16	DINKOMINFO	PROGRAM PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 109.050.400
17	SATPOL PP DAMKAR	PROGRAM PEMELIHARAAN KENTETRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PENEGAKAN PERDA DAN YUSTISI	Rp 18.732.980
18	DINDIKPORA	PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF) UNTUK AUSTS (ANAK USIA SEKOLAH YANG TIDAK SEKOLAH).	Rp 245.188.400
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Rp 30.000.000
19	BPPKPAD	PROGRAM PEMELIHARAAN SARPRAS GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN	PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARAN GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Rp 19.999.720
20	DKK	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK DAN REMAJA	Rp 100.000.000
21	RSU	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	Rp 184.650.206.832
22	DPUPR	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI DAERAH KAB/KOTA	Rp 1.218.492.800
23	KEC. GEMAWANG	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN GEMAWANG	PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN GEMAWANG	Rp 120.000.000
24	KEC. TEMBARAK	PROGRAM PEMBERDAYAAN	KOORDINASI KEGIATAN	Rp 2.040.000

		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PEMBERDAYAAN DESA	
25	KEC. KLEDUNG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KOORDINASI KEGITAN PERBERDAYAAN DESA	Rp 1.720.000
26	KEC. BEJEN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KOORDINASI KEGITAN PERBERDAYAAN DESA	Rp 2.040.000
27	KEC. WONOBOYO	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KOORDINASI KEGITAN PERBERDAYAAN DESA	Rp 1.720.000
28	KEC. KEDU	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KOORDINASI KEGITAN PERBERDAYAAN DESA	Rp 1.750.000
29	KEC. PRINGSURAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KOORDINASI KEGITAN PERBERDAYAAN DESA	Rp 7.140.000
30	KEC. PARAKAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 5.000.000
31	KEC. TRETEP	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 2.040.000
32	KEC. NGADIREJO	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 1.677.500
33	KEC. KALORAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 1.250.000
34	KEC. BULU	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 10.100.000
35	KEC.	PROGRAM PEMBERDAYAAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Rp 12.000.000

	KANDANGAN	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
36	KEC. TLOGOMULYO	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 1.500.000
37	KEC. SELOPAMPANG	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 2.040.000
38	KEC. CANDIROTO	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 1.982.500
JUMLAH				Rp 190.789.977.666

Dari sumber yang dapat kami kumpulkan dapat kami sampaikan beberapa faktor yang mendorong dan yang menghambat proses pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

1. Faktor pendorongnya adalah adanya bintek yang mendorong OPD untuk menyusun ARG
2. Faktor penghambatnya adalah masih kurangnya pemahaman petugas dalam penyusunan ARG.

Untuk lebih detailnya PD yang telah menyusun dan menganggarkan untuk program ARG sebagaimana di tampilkan pada tabel 10.1 tersebut diatas.

9. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Salah satu ukuran kontribusi perempuan dalam perekonomian adalah partisipasi angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah besarnya jumlah perempuan yang bekerja pada angkatan kerja.

Rumus jumlah perempuan yang bekerja pada angkatan kerja dibanding jumlah perempuan usia angkatan kerja kali 100 %.

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Temanggung tahun 2016 s.d 2021 Triwulan I disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9.1
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kabupaten Temanggung 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah angkatan kerja perempuan	193.193	196.600	182.753	196.675	174.643	174.643
2	Jumlah perempuan dalam usia kerja	285.265	289.011	292.608	296.141	307.055	307.055
	Persentase	67,72	68,02	62,45	66,41	56,87	56,87

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Temanggung terlihat fluktuatif, dengan melihat persentase tersebut ada peningkatan jumlah angkatan perempuan dibanding jumlah perempuan dalam usia kerja, terdapat penurunan pada tahun 2016 yaitu 67,72 %. Namun dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi naik turun, yakni dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan lagi 0,3 % dari 67,72 ke 68,02. tahun 2017 ke 2018 turun 6,27 % dari angka 68,02 ke 62,45 dan tahun 2018 ke 2019 ada kenaikan lagi sebesar 3,96 % dari angka 62,45 ke 66,41 sedangkan tahun 2019 ke tahun 2020 turun sebesar 9,54 % dari angka 66,41 ke 56,87 dan pada tahun 2020 ke tahun 2021 sampai Triwulan IV masih sama dengan capaian sampai Triwulan ke IV 2021 dikarenakan belum ada update laporan data terbaru

10. Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Peraturan Menteri Negara PPPA No 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga. Yang diantaranya relevansinya dengan tugas dan fungsi PPPA, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Rumus Rasio KDRT adalah jumlah kasus KDRT dibagi jumlah rumah tangga dikali 1.000

Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Temanggung tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV disajikan pada tabel berikut.

Tabel 10.1
Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga Kabupaten Temanggung, Tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah KDRT	1	4	5	13	9	3
2	Jumlah Rumah Tangga	241.177	246.575	251.334	257.391	212.205	212.205
3	Rasio KDRT	0,004	0,016	0,020	0,05	0,004	0

Meskipun rasio kekerasan dalam rumah tangga 6 tahun terakhir 1:4000 penduduk, namun hal ini cukup memprihatinkan mengingat sudah banyak upaya untuk membangun kepedulian terhadap KDRT, baik melalui *Women Crisis Center* (WCC), Unit Palayanan Terpadu (PTT) di setiap kecamatan, PPA (pelayanan Perempuan dan Anak) di Polres, pendampingan dari Dinas Sosial, koordinasi lintas sektoral melalui P2TP2A (pos pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak) dan optimalisasi peran masyarakat dalam pencatatan dan pelaporan kasus KDRT. Selain itu sudah dilakukan upaya-upaya preventif berupa sosialisasi kepada anak sekolah dan organisasi kemasyarakatan.

Adapun tabel perkasus yang masuk kategori dalam KDRT , perkecamatan pada tahun 2021 , adalah tabel berikut ini :

Tabel. 10.2
KDRT PER KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 TRIWULAN III

No	Jenis Kasus	KECAMATAN																		jumlah		
		Temanggung	Tembarak	Selopampang	Pringsurat	Kranggan	Kaloran	Kandang	Bulu	Kedu	Tlogomulyo	Parakan	Bansari	Kledung	Jumo	Gemawang	Ngadirejo	Candiroto	Bejen		Wonobojo	Tretep
1	Penganiayaan	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3	Phisik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pembunuhan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	penelantaran	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Jumlah	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

11. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

Tenaga kerja dibawah umur adalah seseorang yang dipekerjakan pada usia anak-anak, menurut pasal 68 UU No. 13 tahun 2003, menyebutkan bahwa *pengusaha dilarang mempekerjakan anak*. Dan dalam ketentuan undang undang tersebut, yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun, berarti 18 tahun adalah usia minimum yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja, namun didalam UU yang sama pasal 69, 70 dan 71 menjelaskan pengecualian bagi anak yang berumur 13 – 15 th diijinkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Persentase dapat dilihat pada Tabel dibawah ini dibawah ini:

Tabel 11

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Kabupaten Temanggung Tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah tenaga kerja dibawah umur	105	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
2	Jumlah jiwa anak	114.369	114.292	114.063	113.792	112.439	113.645
	Persentase						

Sumber : DPPKBPPPA tahun 2021

Penarikan pekerja anak merupakan kewenangan pemerintah provinsi Jawa Tengah, sehingga data yang disajikan dari tahun 2016 s.d 2021 Triwulan I belum berubah, sesuai hitungan provinsi, jika kita lihat dari tabel diatas bukan lagi menjadi kewenangan kabupaten.

Faktor pendorong dari pencapaian data tersebut adalah telah dilaksanakan program pemerintah, dimana tenaga kerja usia anak, yang disebabkan karena putus sekolah, diarahkan untuk mengikuti program kejar paket dan pelatihan dengan harapan akan memperoleh SDM dan menambah Skill untuk mencari dalam bursa kerja.

B. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk menurut UU No 52 tahun 2009 adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang.

Rumus untuk memperoleh hasil laju pertumbuhan adalah Jumlah Penduduk tahun tertentu dibagi jumlah penduduk tahun dasar dikalikan selisih jumlah penduduk tahun P_t dengan P_o

$$r = \frac{(P_t/P_o) \times (1/t) - 1}{100} \times 100$$

Keterangan:

P_t = Jumlah penduduk pada tahun t

P_o = Jumlah penduduk pada tahun dasar

t = selisih tahun P_t dengan P_o

r = laju pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2021, sebesar 0,98 %, masih menggunakan data yang lama karena belum didapatkan data update yang terbaru.

Tabel 12
Pertumbuhan Penduduk kabupaten Temanggung
Tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah penduduk	752.509	758.980	765.659	791.264	791.264	791.264
Laju pertumbuhan penduduk (%)	0,9	0,86	0,88	0,98	0,98	0,98

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 14 selama periode 4 tahun yaitu dari tahun 2016 s.d 2017, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung mengalami kenaikan, dan pada tahun 2018 naik kembali menjadi 0,88 , pada tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk kabupaten Temanggung naik 0,1 menjadi

0,98. Dan Pada tahun 2020 belum bisa dihitung karena perhitungan baru bisa dilaksanakan pada akhir tahun yang dipublikasikan pada awal tahun 2021, namun hingga sampai tri wulan IV ini belum mendapatkan datanya.

2. Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kelurahan

Data mikro keluarga merupakan data hasil pengumpulan, pengolahan, berdasarkan pendataan keluarga atau mutasi data keluarga tentang ciri – ciri keluarga meliputi KB (Keluarga Berencana) dan KS (Keluarga Sejahtera) di suatu wilayah sesuai dengan kondisi lapangan dilakukan setiap tahun sekali. Rumus perhitungan persentase penyediaan data mikro keluarga di desa/kelurahan adalah jumlah Dokumen data mikro keluarga yang ada dan yang disajikan dibagi dengan jumlah desa yang ada x 100%.

Tabel 13

Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kelurahan Kabupaten Temanggung tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah dokumen Keluarga yang yang disajikan	289	289	289	289	289	289
2	Jumlah KK	289	289	289	289	289	289
	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Data mikro keluarga merupakan data berkembang yang dilaporkan setiap tahun oleh masing masing kecamatan yang diolah untuk mengetahui perkembangan KK, KB dan KS di Kabupaten Temanggung. Dari hasil laporan kecamatan pada periode tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV, jumlah RW mengalami tambahan yaitu di tahun 2016 bertambah 6, di tahun 2017 bertambah 3 dan di tahun 2018 bertambah 3, sedangkan jumlah KK selama 5 tahun mengalami tambahan dari 253.878 pada tahun 2016 menjadi 263.885 pada tahun 2020, untuk tahun 2021 data masih menggunakan data tahun 2020, dikarenakan pada tahun 2021, kegiatan pendataan keluarga tahun 2021 belum bias diakses

TABEL 14
Jumlah Kepala Keluarga per Kecamatan
Kabupaten Temanggung tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga						
		Pria		Wanita		Jumlah		
	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Kecamatan	%	Jumlah
1	BULU	14.351	86,31	2.276	13,69	16.627	6,16	14.204
2	TEMBARAK	8.541	84,95	1.513	15,05	10.054	3,72	8.352
3	TEMANGGUNG	22.268	80,13	5.522	19,87	27.790	10,29	22.061
4	PRINGSURAT	15.167	84,85	2.708	15,15	17.875	6,62	14.912
5	KALORAN	13.613	84,84	2.432	15,16	16.045	5,94	13.449
6	KANDANGAN	14.944	85,34	2.568	14,66	17.512	6,48	14.840
7	KEDU	17.041	84,08	3.227	15,92	20.268	7,5	16.794
8	PARAKAN	14.586	80,92	3.440	19,08	18.026	6,67	14.390
9	NGADIREJO	16.028	83,75	3.109	16,25	19.137	7,09	15.938
10	JUMO	9.041	85,28	1.561	14,72	10.602	3,93	8.943
11	TRETEP	6.453	89,35	769	10,65	7.222	2,67	6.392
12	CANDIROTO	9.677	84,63	1.757	15,37	11.434	4,23	9.588
13	KRANGGAN	14.264	83,19	2.883	16,81	17.147	6,35	14.106
14	TLOGOMULYO	6.782	87,25	991	12,75	7.773	2,88	6.732
15	SELOPAMPANG	5.504	81,94	1.213	18,06	6.717	2,49	5.442
16	BANSARI	7.131	86,9	1.075	13,1	8.206	3,04	7.078
17	KLEDUNG	8.349	86,36	1.319	13,64	9.668	3,58	8.254
18	BEJEN	6.340	84,76	1.140	15,24	7.480	2,77	6.292
19	WONOBOYO	7.696	87,26	1.124	12,74	8.820	3,27	7.509
20	GEMAWANG	10.233	87,72	1.433	12,28	11.666	4,32	10.192
Jumlah		228.009	0,84	42.060	0,00	225.468	85,27	38.938
Jumlah Total		228.009	84,43	42.060	0,00	225.468	85,27	38.938

3. Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed

Unmetneed merupakan jumlah Pasangan usia subur yang tidak menggunakan alat kontrasepsi (tidak KB) yang terdiri dari pasangan usia subur Ingin Anak Tunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL).

Rumus prosentase Unmetneed : Jumlah pasangan usia subur (PUS) dikurangi jumlah peserta KB aktif dikurangi PUS hamil dan Ingin Anak Segera (IAS)dibagi pasangan usia subur x100 %.

Tabel 15

Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi

(Unmetneed)

Kabupaten Temanggung tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

Semakin kecil jumlah persentase unmetneed maka nilainya semakin baik. Selama periode tahun 2016 – 2021, unmetneed tertinggi di tahun 2021 sebesar 13,76 dari PUS 130.415, dan terendah di tahun 2016 yaitu 7,11 dari PUS 142.704. harapan dari Unmetneed dari tahun ke tahun adalah menurun, namun pada tahun 2020 angkanya naik terus dikarena ada pemutahiran data yang dilaksanakan di lini lapangan, untuk pencapaian pada tahun 2021 Triwulan III angka unmetneed masih ada kenaikan 2,33 dari 11,43 % menjadi

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PUS Unmetneed	10.292	10.300	9.825	15.309	17.948	17.012
2	Jumlah PUS	144.641	144.401	144.426	133.827	130.415	130.996
	Persentase	7,11	7,13	6,80	11,43	13,76	12,99

12, 65 % . Salah satu penyebabnya adalah dampak dari pandemic covid 19,yang mana pelayanan tidak bisa dilaksanakan secara optimal.khususnya pelayanan MKJP,yang mendukung kelestarian Peserta Kbaktif.

Tabel 16
PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terlayani (unmet need)
Kabupaten Temanggung, tahun 2016 s.d 2021 triwulan IV

No	Kecamatan	Tahun											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		Jml		Jml		Jml						Jml	
		PUS	Unmet need										
1	Temanggung	13.521	965	14.141	1.030	14.499	13.521	14.141	965	14.499	11.237	11.237	1.960
2	Tlogomulyo	4.541	255	4.698	287	4.788	4.541	4.698	255	4.788	4.138	4.138	380
3	Kranggan	8.387	478	8.542	494	8.628	8.387	8.542	478	8.628	8.200	8.200	862
4	Tembarak	5.387	316	5.423	286	5.431	5.387	5.423	316	5.431	5.084	5.084	771
5	Selopampang	3.535	202	3.660	281	3.759	3.535	3.660	202	3.759	3.319	3.319	411
6	Pringsurat	9.718	470	9.702	400	9.263	9.718	9.702	470	9.263	8.914	8.914	873
7	Kaloran	8.576	446	7.790	586	7.760	8.576	7.790	446	7.760	7.607	7.607	958
8	Parakan	9.165	1.037	9.603	1.182	9.133	9.165	9.603	1.037	9.133	7.849	7.849	1.677
9	Bansari	4.812	343	4.693	255	4.700	4.812	4.693	343	4.700	4.193	4.193	372

10	Kledung	5.190	315	5.212	277	5.196	5.190	5.212	315	5.196	5.095	5.095	458
11	Ke du	10.781	940	10.699	879	10.733	10.781	10.699	940	10.733	9.415	9.415	1.185
12	Bu lu	8.804	584	8.784	611	8.409	8.804	8.784	584	8.409	8.418	8.418	765
13	Kandangan	9.398	796	9.188	493	9.237	9.398	9.188	796	9.237	8.792	8.792	1.098
14	Candiroto	5.665	412	5.731	401	5.692	5.665	5.731	412	5.692	5.295	5.295	724
15	Be jen	4.083	328	4.112	365	4.124	4.083	4.112	328	4.124	3.700	3.700	519
16	Ju mo	5.567	417	5.594	372	5.683	5.567	5.594	417	5.683	4.973	4.973	617
17	Gemawang	6.829	635	6.870	651	6.955	6.829	6.870	635	6.955	6.074	6.074	605
18	Tretep	5.125	394	5.125	430	5.326	5.125	5.125	394	5.326	4.688	4.688	805
19	Wonoboyo	5.049	329	4.756	354	4.781	5.049	4.756	329	4.781	4.777	4.777	428
20	Ngadirejo	10.508	634	10.078	666	10.329	10.508	10.078	634	10.329	9.228	9.228	1.544
Jumlah			144.641	10.296	144.401	10.300	144.426	144.641	10.296	965	10.300	130.996	130.996
% dari PUS yang ada				7,12		7,13			7,12		7,13		12,99

4. Persentase Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 th

PUS (pasangan usai subur) adalah pasangan antara laki laki dan perempuan yang didasarkan pada perkawinan yang sah. PUS dibawah 20 th adalah pasangan usia subur yang menikah dengan sah dengan istri berumur kurang dari 20 tahun(UU no 52 tahun 2009 pasal 1 ayat 8)

Rumus dari PUS Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 th adalah Jumlah Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 th < dibagi jumlah PUS secara keseluruhan dikalikan 100%.

Tabel 17
PUS < 20 TH
Kabupaten Temanggung, tahun 2016 s.d 2021 Triwulan III

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PUS < 20 TH	3.756	3.861	2.995	2.038	2.823	1332
2	Jumlah PUS	144.210	143.639	143.830	133.827	130.145	130.966
3	Prosentase	2,60	2,69	2,08	1,52	2,16	1,02

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA Kabupaten Temanggung / hasil PK 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa PUS dibawah 20 tahun cenderung meningkat dari tahun 2016 sampai th 2017, pada tahun 2018 turun, pada bulan november 2019 Triwulan IV persentase PUS dibawah 20 tahun cenderung lebih menurun , Pada tahun 2020 ini sudah ada upaya peningkatan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang kesehatan reproduksi sehat (KRR) bagi remaja dalam kegiatan PIK Remaja dari jalur organisasi remaja dan jalur sekolah dengan kegiatan SSK (Sekolah Siaga Kependudukan). Pencapaian untuk tahun 2021 Triwulan IV angka nya turun berdasarkan hasil PK 2021 dan hasil perkembangan laporan dari Kecamatan . adapun tabel PUS dibawah 20 tahun,pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 18
PUS DIBAWAH 20 TAHUN
Kabupaten Temanggung tahun 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH PUS	JUMLAH PUS UMUR 15 - 19 TH	%	Ket
1	2		4	5	
1	Temanggung	11.237	96	0,01	
2	Tlogomulyo	4.138	47	0,05	
3	Kranggan	8.200	44	0,04	
4	Tembarak	5.084	63	0,08	
5	Selopampang	3.319	73	0,15	
6	Pringsurat	8.914	76	0,07	
7	Kaloran	7.607	83	0,09	
8	Parakan	7.849	48	0,10	
9	Bansari	4.193	94	0,21	
10	Kledung	5.095	59	0,20	
11	Kedu	9.415	125	0,12	
12	Bulu	8.418	82	0,14	
13	Kandangan	8.792	42	0,15	
14	Candiroto	5.295	74	0,26	
15	Bejen	3.700	33	0,41	
16	Jumo	4.973	39	0,32	
17	Gemawang	6.074	58	0,28	
18	Tretep	4.688	27	0,38	
19	Wonoboyo	4.777	80	0,40	
20	Ngadirejo	9.228	89	0,22	
	TOTAL	130.996	1332	1,02	

5. Angka Kelahiran Remaja Usia 15 -19 Tahun (ASFR 15 – 19 Th)

ASFR (Age Specifik Fertility Rates) adalah banyaknya kelahiran selama setahun pada kelompok umur tertentu .

Sedangkan ASFR 15 – 19 Tahun . adalah banyaknya kelahiran selama setahun pada kelompok umur 15 – 19 tahun . Angka ini dapat digunakan untuk membedakan fertilitas dari wanita usia subur menurut kelompok umurnya,

Rumus dari pada ASFR 15- 19 th adalah :

$$\text{ASFR 15-19th} = (B \ 15 - 19 \ TH) / (Pf \ 15 - 19 \ th) \times 1000$$

B 15 – 19 TH : jumlah kelahiran didalam kelompok umur 15 – 19 tahun

Selama 1 tahun

Pf 15 – 19 th : Jumlah perempuan kelompok umur 15- 19 tahun pada

Pertengahan tahun yang sama

Untuk perhitungan ASFR ini di kabupaten Temanggung, yang bersumber di dinas PPKBPPPA dihitung berdasar hasil Pendataan keluarga yang dilaksanakan pada 5 tahun sekali.

Tabel 19

Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)
tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kelahiran	n.a	n.a	n.a	n.a	616	276
2	Jumlah wanita usia 15 – 19 th	n.a	n.a	n.a	n.a	28.899	28.166
3	Persentase					21,32	9,80

Sumber data : DPPAPPKB TAHUN 2021 / PK 2021

Dari tabel diatas belum bisa menyajikan pertahunnya karena dasar dari penyajian data tersebut bedasarkan up dating data setiap 5 tahun sekali ,untuk tahun 2021 sampai dengan TW IV , menggunakan

Dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa ASFR 15 – 19 TH di kabupaten Temanggung perlu juga penanganan lebih lanjut. Hal ini bisa dilihat dari

prosentase pernikahan dini yang masih tinggi .Dan kami selalu berupaya menurunkannya dengan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) melalui jalur sekolah (SSK/sekolah siaga kependudukan dan KIE kepada remaja melalui kegiatan di kelompok pusat informasi konseling remaja (PIK-Remaja). Namun kalau dilihat dari pencapaian variabel PUS dibawah usia 20 th angka nya semakin menurun , hal ini menunjukkan hasil dari peningkatan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

Adapun, tabel kelahiran oleh wanita usia subur antara 15 – 19 tahun adalah:

Tabel 19
ASFR 15 – 19 TH
Kabupaten Temanggung tahun 2021
DATA KELAHIRAN OLEH WANITA USIA 15 – 19 TH

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH WUS USIA 15 – 19 TAHUN	JUMLAH WUS USIA 15 – 19 TAHUN YANG MELAHIRKAN	%	Ket
1	2		4	5	
1	Temanggung	777	11	14,16	
2	Tlogomulyo	752	6	7,98	
3	Kranggan	1726	16	9,27	
4	Tembarak	1143	18	15,75	
5	Selopampang	1258	16	12,72	
6	Pringsurat	1059	15	14,16	
7	Kaloran	1557	17	10,92	
8	Parakan	1850	19	10,27	
9	Bansari	2120	17	8,02	
10	Kledung	832	12	14,42	
11	Kedu	1698	12	7,07	
12	Bulu	2056	20	9,73	
13	Kandangan	1925	8	4,16	
14	Candiroto	1945	8	4,11	

15	Bejen	716	8	11,17	
16	Jumo	3069	9	2,93	
17	Gemawang	1194	8	6,7	
18	Tretep	853	14	16,41	
19	Wonoboyo	689	27	39,19	
20	Ngadirejo	947	15	15,84	
	TOTAL	28166	276	9,8	

6. Prosentase PUS yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis kontrasepsi modern.

PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis kontrasepsi moderen adalah PUS yang tahu tentang semua alat kontrasepsi dari proses pemasangan, jangka waktu penggunaan, efektifitas penggunaan dan efek samping dari alat kontrasepsi tersebut. Rumus prosentase adalah : jumlah seluruh PUS yang tahu dan paham tentang alat kontrasepsi moderen dibandingkan seluruh jumlah PUS dikalikan 100 %.

Tabel 20.1
PUS Yang mengetahui dan memahami tentang alat kontrasepsi modern
Kabupaten Temanggung, tahun 2016 s.d 2021 Triwulan III

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PUS yang tahu dan memahami alokon modern	119.019	118.402	119.774	111.117	107.739	98.622
2	Jumlah PUS	144.210	143.639	143.830	133.827	130.415	130.966
3	Persentase	82,53	82,43	83,27	83,03	82,61	75,29

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pengetahuan PUS tentang alokon modern semakin meningkat dari tahun 2016 s.d 2021 triwulan IV, setiap PUS mau menggunakan alat kontrasepsi karena tahu tentang jenis, jangka waktu

dan efek samping alokon yang akan digunakan, adapun pencapaian perkecamatan adalah :

Tabel 20.2

PUS Yang mengetahui dan memahami tentang alat kontrasepsi modern Kabupaten Temanggung, tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

NO	KECAMATAN	PUS	JUMLAH PA	PUS YANG MEMAHAMI KONTRASEPSI MODEREN
1	Temanggung	11.237	7.569	67,36
2	Tlogomulyo	4.138	3.293	79,58
3	Kranggan	8.200	6.301	76,84
4	Tembarak	5.084	3.700	72,78
5	Selopampang	3.319	2.522	75,99
6	Pringsurat	8.914	6.867	77,04
7	Kaloran	7.607	5.699	74,92
8	Parakan	7.849	5.382	68,57
9	Bansari	4.193	3.350	79,90
10	Kledung	5.095	3.991	78,33
11	K e d u	9.415	7.095	75,36
12	B u l u	8.418	6.725	79,89
13	Kandangan	8.792	6.591	74,97
14	Candiroto	5.295	3.999	75,52
15	B e j e n	3.700	2.848	76,97
16	J u m o	4.973	3.847	77,36
16	Gemawang	6.074	4.849	79,83
18	Tretep	4.688	3.481	74,25
19	Wonoboyo	4.777	3.926	82,19
20	Ngadirejo	9.228	6.587	71,38
	JUMLAH	130.996	98.622	75,29

7. Perkawinan Usia Anak, (Jumlah pemuda perempuan berumur 20-24 tahun yang saat perkawinan pertamanya berumur di bawah 18 tahun)

Yang dimaksud perkawinana usia anak menurut UU no 1 tahun 1974 , adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum dewasa atau dibawah usia 18 tahun

Untuk mendapatkan angka persentase perkawinan usia anak adalah jumlah perkawinan dari pihak perempuan (usia perkawinan pertama / UKP) yang berumur dibawah 18 tahun dibagi jumlah pemuda perempuan usia 20 – 24 tahun dikalikan 100 %

Adapun persentase perkawinan usia Anak ini di Kabupaten Temanggung berdasarkan data dari hasil pendataan tahun 2015 adalah :

Tabel 21
Perkawinan Usia Anak, (Jumlah dan lokasi pemuda perempuan berumur 20-24 tahun yang saat perkawinan pertamanya berumur di bawah 18 th Kabupaten Temanggung, tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pemuda perempuan dengan usia perkawinan pertama /UKP dibawah 18 tahun	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	296
2	Jumlah pemuda perempuan usia 20 – 24 tahun	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	28.241
3	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	1,05

Sumber DPPAPPKB/ PK21

Untuk data perkawinan usia anak yang usia kawin pertama dibawah 18 tahun dari DPPAPPKB untuk tahun 2021 , menggunakan data PK21

Adapun data perkecamatan adalah :

Tabel 21.1

**Perkawinan Usia anak (Jumlah dan lokasi pemuda perempuan berumur
20 – 24 th yang pada saat usia perkawinan pertama dibawah 18**

NO	KECAMATAN	JENIS DATA		KETERANGAN
		PEMUDA PEREMPUAN USIA 20 - 24	UKP DIBAWAH 18 TAHUN	
1	BULU	1.666	22	
2	TEMBARAK	1.114	11	
3	TEMANGGUNG	2.936	12	
4	PRINGSURAT	1.873	12	
5	KALORAN	1.671	12	
6	KANDANGAN	1.886	25	
7	KEDU	2.181	34	
8	PARAKAN	1.941	10	
9	NGADIREJO	2.008	16	
10	JUMO	1.070	11	
11	TRETEP	801	14	
12	CANDIROTO	1.125	13	
13	KRANGGAN	1.708	18	
14	TLOGOMULYO	909	13	
15	SELOMPAMPANG	753	7	
16	BANSARI	777	10	
17	KLEDUNG	891	7	
18	BEJEN	821	11	
19	WONOBOYO	938	22	
20	GEMAWANG	1.180	16	
	JUMLAH	28.249	298	

8. Remaja Perempuan yang hamil, (jumlah dan lokasi penduduk kelompok perempuan pernah kawin umur 15-18 tahun)

Yang dimaksud remaja perempuan hamil adalah kehamilan yang terjadi pada perempuan dibawah usia 20 tahun Sedangkan persentase remaja perempuan hamil adalah jumlah kehamilan perempuan dibawah usia 20 tahun dibandingkan jumlah kelompok perempuan pernah kawin umur 15 sampai 18 tahun dikalikan 100 % .

Untuk data ini belum bisa kami sajikan dikarena dalam indikator pendataan belum ada . tentunya hal ini perlu penanganan lebih lanjut dengan melibatkab dinas lintas sektoral , Dinas Kesehatan, Kemenang / KUA dan Dppkbpppa serta Dindukcapil.

9. Persentase kepesertaan KB aktif / .Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun

Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur yang secara berkelanjutan menggunakan alat kontrasepsi baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) atau Non MKJP

Rumus Jumlah peserta KB Aktif dibagi jumlah PUS di kali 100

Tabel 22
Jumlah Peserta KB Aktif Kabupaten Temanggung
Tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Peserta KB	119.019	118.402	119.774	103.717	97.427	98.622
2	Jumlah Pasangan Usia subur (PUS)	144.210	143.639	143.830	133.827	130.415	130.996
	Persentase	82,53	82,32	83,27	77,50	74,70	75,29

S

umber: DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kecenderungan kepesertaan KB aktif meurun selama tahun 2016 – 2021, terendah ditahun 2021 dengan kepesertaan KB 75,29 % dari PUS 130.966 dan tertinggi ditahun 2016 dengan total 82,53 % dari PUS 144.210, angka ini merupakan capaian diatas target nasional yaitu sebesar 75%, sampai Triwulan IV tahun 2021, sebesar 75,29%

Berdasarkan hasil pemutakhiran data yang dilaksanakan pada awal tahun 2019 (April 2019) diperoleh data peserta KB aktif Kabupaten Temanggung 78.75 % dan sampai Triwulan IV.

Selanjutnya pada tahun 2021, Setelah kegiatan pendataan keluarga tahun 2020 ditunda karena pandemi covid 19, Secara serentak seluruh Indonesia dilaksanakan kegiatan pendataan keluarga /PK21, yang dilakukan oleh kader Institusi Masyarakat Pedesaan [IMP] bersama dengan PKB. Hasil kegiatan ini baru diperoleh angkanya pada bulan November 2021, namun belum dipublikasikan. Namun angka tersebut sudah bisa dipakai sebagai acuan kegiatan di lapangan, dan diikuti perkembangannya sampai bulan Desember 2021.

Dari hasil pendataan PK21 dan sampai kondisi bulan Desember 2021 peserta KB di kabupaten Temanggung sejumlah 98.622 atau 75.26 dari jumlah PUS 130.966. Hal ini disebabkan beberapa faktor :

1. Adanya dampak dari pandemi covid 19 yang berakibat banyak peserta KB yang DO (tidak terdaftar sebagai peserta KB aktif) karena tidak terlayannya sebagai peserta KB terutama KB MKJP(MO , IUD , Implan)
2. Meningkatnya jumlah yang DO PUS (karena umur 49 keatas . sudah tidak masuk kategori PUS). Yang berakibat juga menurunnya jumlah peserta KB

Tabel 23

Persentase kepesertaan KB aktif / .Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun Kabupaten Temanggung . Tahun 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Kecamatan	Tahun																	
		2016			2017			2018			2019			2020			2021		
		Jumlah			Jumlah			Jumlah			Jumlah			jumlah			Jumlah		
		PUS	PA	MKJP	PUS	PA	MKJP	PUS	PA	MKJP	PUS	PA	MKJP	PUS	PA	MKJP	PUS	PA	MKJP
1	Temanggung	13.521	11.333	4.751	14.141	11.733	5.252	14.499	12.018	5.634	11.116	7.545	3.250	10.971	6.819	11.237	11.237	7.569	3.262
2	Tlogomulyo	4.541	3.827	1.500	4.698	4.067	1.681	4.788	4.100	1.780	4.725	3.719	1.740	4.200	3.401	4.138	4.138	3.293	1.256
3	Kranggan	8.387	6.953	4.223	8.542	7.149	4.456	8.628	7.169	4.516	8.072	6.468	4.102	8.089	6.273	8.200	8.200	6.301	3.771
4	Tembarak	5.387	4.600	1.948	5.423	4.636	2.084	5.431	4.680	2.147	5.279	4.205	1.739	5.082	3.583	5.084	5.084	3.700	1.260
5	Selopampang	3.535	2.985	1.633	3.660	3.081	1.790	3.759	3.176	1.869	3.394	2.737	1.428	3.266	2.441	3.319	3.319	2.522	1.352
6	Pringsurat	9.718	8.301	4.037	9.702	8.362	4.056	9.263	7.754	3.632	9.122	7.193	3.362	8.773	6.811	8.914	8.914	6.867	3.254
7	Kaloran	8.576	7.139	3.934	7.790	6.468	3.772	7.760	6.528	3.774	7.720	6.173	3.645	7.597	5.693	7.607	7.607	5.699	3.185
8	Parakan	9.165	7.155	2.993	9.603	7.369	3.249	9.133	7.613	3.571	7.714	5.674	2.664	7.855	5.284	7.849	7.849	5.382	2.741
9	Bansari	4.812	3.943	1.724	4.693	3.863	1.651	4.700	3.937	1.736	4.511	3.589	1.632	4.402	3.504	4.193	4.193	3.350	1.368
10	Kledung	5.190	4.293	1.710	5.212	4.272	1.839	5.196	4.346	1.918	5.139	4.069	1.819	5.058	3.965	5.095	5.095	3.991	1.586
11	K e d u	10.781	8.784	4.415	10.699	8.825	3.763	10.733	8.953	3.941	8.903	6.543	2.985	9.353	7.294	9.415	9.415	7.095	3.032
12	B u l u	8.804	7.394	3.195	8.784	7.264	2.918	8.409	6.997	3.171	8.349	6.752	3.139	8.228	6.521	8.418	8.418	6.725	2.772

13	Kandangan	9398	7.604	3.834	9.188	7.486	4.135	9.237	7.821	4.361	9.011	7.108	3.847	8.828	6.640	8.792	8.792	6.591	3.632
14	Candiroto	5.665	4.692	1.964	5.731	4.785	2.056	5.692	4.831	2.088	5.408	4.319	1.855	5.230	3.942	5.295	5.295	3.999	1.676
15	Bejen	4.083	3.413	1.730	4.112	3.428	1.782	4.124	3.459	1.810	3.703	2.949	1.591	3.687	2.850	3.700	3.700	2.848	1.301
16	Jumo	5.567	4.479	2.636	5.594	4.599	2.813	5.683	4.719	3.132	4.822	3.808	2.287	5012	3.809	4.973	4.973	3.847	1.966
17	Gemawang	6.829	5.404	3.330	6.870	5.558	3.424	6.955	5.653	3.476	7.030	5.616	3.327	6.074	4.837	6.074	6.074	4.849	2.473
18	Tretep	5.125	4.217	1.341	5.125	4.290	1.391	5.326	4.348	1.471	5.326	4.282	1.366	4.693	3.658	4.688	4.688	3.481	881
19	Wonoboyo	5.049	4.276	1.428	4.756	3.914	1.158	4.781	4.001	1.223	4.789	3.750	1.172	4.789	3.884	4.777	4.777	3.926	1.227
20	Ngadirejo	10.508	8.867	3.133	10.078	8.283	3.283	10.329	8.563	3.445	9.821	7.785	3.118	9.228	6.218	9.228	9.228	6.587	2.594
Jumlah		14.2704	144.641	119.659	55.459	144.401	119.432	56.553	144.426	120.666	58.695	133.827	10.3717	49.809	130.415	97.427	130.996	98.622	44.589
% dari PUS yang ada				82,73	46,35		82,71	47,35		83,55	48,64	133.827	77,50	48,02	130.415	74,71	11.237	11.237	45,21

10. Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang

PUS dengan MKJP adalah jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (Implant, IUD, MOP dan MOW).

Rumus Jumlah peserta KB Metode kontrasepsi jangka panjang dibagi jumlah PUS yang menggunakan alat kontrasepsi.

Keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang , kabupaten Temanggung tahun 2015 s.d 2021 triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 24
Jumlah PUS MKJP Kabupaten Temanggung
Tahun 2016-2021(Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Peserta KB MKJP	55.459	56.553	58.695	49.809	44.212	44.589
2	Jumlah (PUS) yang ber -KB	119.659	119 . 432	120.666	103.717	97.427	98 622
	Persentase		44,40	46,35	47,35	48,02	45,21

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah peserta KB MKJP meningkat dari tahun 2015 – 2020, namun di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 45,21 % , hal ini disebabkan karena turunnya PUS yang menggunakan alat kontrasepsi .Untuk pencapaian pada Triwulan IV mengalami penurunan dibanding Triwulan III,dengan pencapaian 45,21% ,hal ini terjadi seiring dengan hasil kegiatan Pendataan tahun 2021/PK21 berikut perkembangannya sampai bulan Desember 2021,jumlah peserta kb MKJP Kabupaten Temanggung 44.589 /45.21% dari jumlah PESERTA kb AKTIF 98.622. Pencapaian peserta KB Kabupaten Temanggung masih lebih tinggi dibandingkan pencapaian tingkat propinsi Jawa Tengah

Pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang , kabupaten Temanggung per kecamatan tahun 2014 s.d 2021 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 24.1

Jumlah Pus yang menggunakan alokon MKJP

No	Kecamatan	Tahun																	
		2016			2017			2018			2019			2020			2021		
		Jumlah			Jumlah			jumlah			Jumlah			Jumlah			Jumlah		
		PUS	PA	MKJP	PUS	PA	MKJP	PUS	PA	MKJP	PUS	PA	MKJP	PUS	PA	MKJP	PUS	PA	MKJP
1	Temanggung	13.521	11.333	4.751	14.141	11.733	5.252	14.499	12.018	5.634	11.116	7.545	3.250	10.971	6.819	3.089	11.044	6.912	3.130
2	Tlogomulyo	4.541	3.827	1.500	4.698	4.067	1.681	4.788	4.100	1.780	4.725	3.719	1.740	4.200	3.401	1.350	4.124	3.329	1.306
3	Kranggan	8.387	6.953	4.223	8.542	7.149	4.456	8.628	7.169	4.516	8.072	6.468	4.102	8.089	6.273	3.857	8.157	6.335	3.834
4	Tembarak	5.387	4.600	1.948	5.423	4.636	2.084	5.431	4.680	2.147	5.279	4.205	1.739	5.082	3.583	1.298	5.079	3.614	1.292
5	Seloppngg	3.535	2.985	1.633	3.660	3.081	1.790	3.759	3.176	1.869	3.394	2.737	1.428	3.266	2.441	1.393	3.293	2.462	1.317
6	Pringsurat	9.718	8.301	4.037	9.702	8.362	4.056	9.263	7.754	3.632	9.122	7.193	3.362	8.773	6.811	3.313	8.775	6.816	3.229
7	Kaloran	8.576	7.139	3.934	7.790	6.468	3.772	7.760	6.528	3.774	7.720	6.173	3.645	7.597	5.693	3.213	7.704	5.924	3.504
8	Parakan	9.165	7.155	2.993	9.603	7.369	3.249	9.133	7.613	3.571	7.714	5.674	2.664	7.855	5.284	3.170	7.855	5.328	2.672
9	Bansari	4.812	3.943	1.724	4.693	3.863	1.651	4.700	3.937	1.736	4.511	3.589	1.632	4.402	3.504	1.546	4.380	3.523	1.507
10	Kledung	5.190	4.293	1.710	5.212	4.272	1.839	5.196	4.346	1.918	5.139	4.069	1.819	5.058	3.965	1.517	5.078	3.974	1.526
11	Kedu	10.781	8.784	4.415	10.699	8.825	3.763	10.733	8.953	3.941	8.903	6.543	2.985	9.353	7.294	3.107	9.353	7.299	3.094

12	Bulu	8.804	7.394	3.195	8.784	7.264	2.918	8.409	6.997	3.171	8.349	6.752	3.139	8.228	6.521	2.796	8.278	6.548	2.771
13	Kandangan	9.398	7.604	3.834	9.188	7.486	4.135	9.237	7.821	4.361	9.011	7.108	3.847	8.828	6.640	3.637	8.735	6.541	3.610
14	Candiroto	5.665	4.692	1.964	5.731	4.785	2.056	5.692	4.831	2.088	5.408	4.319	1.855	5.230	3.942	1.604	5.230	3.956	1.618
15	Bejen	4.083	3.413	1.730	4.112	3.428	1.782	4.124	3.459	1.810	3.703	2.949	1.591	3.687	2.850	1.335	3.687	2.840	1.336
16	Jumo	5.567	4.479	2.636	5.594	4.599	2.813	5.683	4.719	3.132	4.822	3.808	2.287	5.012	3.809	1.907	5.012	3.868	1.934
17	Gemawang	6.829	5.404	3.330	6.870	5.558	3.424	6.955	5.653	3.476	7.030	5.616	3.327	6.074	4.837	2.402	6.074	4.864	2.405
18	Tretep	5.125	4.217	1.341	5.125	4.290	1.391	5.326	4.348	1.471	5.326	4.282	1.366	4.693	3.658	840	4.674	3.665	843
19	Wonobojo	5.049	4.276	1.428	4.756	3.914	1.158	4.781	4.001	1.223	4.789	3.750	1.172	4.789	3.884	1.200	4.777	3.481	1.178
20	Ngadirejo	10.508	8.867	3.133	10.078	8.283	3.283	10.329	8.563	3.445	9.821	7.785	3.118	9.228	6.218	2.431	9.227	6.304	2.464
	Jumlah	142.704	144.641	119.659	55.459	144.401	119.432	56.553	144.426	120.666	58.695	133.954	104.284	50.068	130.415	97.427	130.763	97.749	44.444
	% dari PUS yang ada			82,73	46,35		82,71	47,35		83,55	48,64		77,85	48,01		74,71	75,56	75,07	45,21

11. Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW atau Dusun yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan atau Pembangunan Keluarga (KKBP) dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis . Rumus persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM) adalah jumlah seluruh kampung KB dibagi jumlah desa dengan kriteria IDM desa berkembang dikalikan 100 % .

Indek Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS) , Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekologi (IKL) suatu Desa, IDM ini disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri .

Tujuan penyusunan IDM adalah :

- a. Menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa; dan
- b. Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa

Indek Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan ekonomi, indeks ketahanan desa dan indeks ekologis , yang terjabar dalam demensi sosial , demensi ekonomi dan demensi ekologi, yang mana dari demensi – demensi tersebut terdiri dari beberapa undikator , sebagai acuan menentukan kriteria suatu desa , yang berhitungannya dari rata – rata dari IKS, IKE dan IKL)

Kriteria desa berdasarkan IKS, IKE dan IKL , terdiri dari

- A. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar bwesarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi , dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan . Desa Mandiri atau desa madya adalah desa yang memiliki indek desa membangun lebih besar (>) dari 0,8155.
- B. Desa Maju atau yang disebut desa prasembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial , ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa , kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemeiskinan . desa maju atau desa pramadya adalah desa yang memiliki indek desa membangun kurang dan sama (< dan =) 0,8155 dan lebih besar (>) dari 0, 7072.
- C. Desa berkembang atau yang disebut desa madya adalah desa potensial menjadi desa maju , yang memilikim potensi sumberr daya

Tabel 25
REKAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2020

KODE PROV	NAMA PROVINSI	KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	STATUS IDM 2020
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012001	BULU	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012002	TEGALURUNG	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012003	CAMPURSARI	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012004	GANDUREJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012005	TEGALREJO	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012006	GONDOSULI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012007	NGIMBRANG	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012008	PUTAT	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012009	DANUPAYAN	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012010	MONDORETNO	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012011	PANDEMULYO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012012	PASURUAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012013	PAKUREJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012014	MALANGSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012015	PAGERGUNUNG	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012016	WONOSARI	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012017	BANSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012018	WONOTIRTO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332301	BULU	3323012019	PENGILON	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022001	TEMBARAK	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022002	MENGGORO	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022003	PURWODADI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022004	WONOKERSO	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022005	KEMLOKO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022006	GANDU	BERKEMBANG

33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022007	BOTOPUTIH	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022008	TAWANGSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022009	GREGES	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022010	KRAJAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022011	JRAGAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022012	DRONO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332302	TEMBARAK	3323022013	BANARAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332303	TEMANGGUNG	3323032011	JOHO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332303	TEMANGGUNG	3323032017	GUNTUR	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332303	TEMANGGUNG	3323032019	LUNGGE	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332303	TEMANGGUNG	3323032020	MUDAL	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332303	TEMANGGUNG	3323032021	GILINGSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332303	TEMANGGUNG	3323032024	NAMPIREJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042001	PRINGSURAT	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042002	KEBUMEN	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042003	SOROPADAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042004	KUPEN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042005	KARANGWUNI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042006	GOWAK	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042007	REJOSARI	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042008	NGIPIK	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042009	PINGIT	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042010	KLEPU	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042011	SOBOREJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042012	NGLOROG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042013	PAGERGUNUNG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332304	PRINGSURAT	3323042014	WONOKERSO	BERKEMBANG

33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052001	KALORAN	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052002	TLOGOWUNGU	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052003	GANDON	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052004	TLETER	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052005	GETAS	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052006	KALIMANGGIS	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052007	TEMPURAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052008	KEMIRI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052009	GEBLOG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052010	TEGOWANUH	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052011	KEBLUKAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052012	TEPUSEN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052013	GANDULAN	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332305	KALORAN	3323052014	KWARAKAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062001	KANDANGAN	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062002	BALEDU	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062003	CARUBAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062004	WADAS	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062005	SAMIRANAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062006	NGEMPLAK	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062007	KEMBANGSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062008	GESING	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062009	MARGOLELO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062010	BLIMBING	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062011	KEDUNGUMPUL	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062012	ROWO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062013	MALEBO	BERKEMBANG

33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062014	TLOGOPUCANG	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062015	KEDAWUNG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332306	KANDANGAN	3323062016	BANJARSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072001	KEDU	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072002	CANDIMULYO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072003	SALAMSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072004	DANUREJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072005	MOJOTENGAH	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072006	KARANGTEJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072007	MERGOWATI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072008	KUTOANYAR	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072009	KUNDISARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072010	NGADIMULYO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072011	GONDANGWAYANG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072012	BOJONEGORO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072013	BANDUNGGEDE	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332307	KEDU	3323072014	TEGALSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082002	CAMPURSALAM	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082003	WANUTENGAH	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082004	NGLONDONG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082005	BAGUSAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082007	DANGKEL	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082008	MANDISARI	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082009	TEGALROSO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082010	TRAJI	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082011	WATUKUMPUL	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082012	RINGINANOM	BERKEMBANG

33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082013	DEPOKHARJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082014	CATURANOM	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082015	GLAPANSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332308	PARAKAN	3323082016	SUNGGINGSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092001	NGADIREJO	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092002	GONDANGWINA NGUN	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092003	GANDU WETAN	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092004	NGAREN	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092005	MANGUNSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092006	DLIMOYO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092007	PURBOSARI	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092008	CAMPURSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092009	TEGALREJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092010	GIRIPURNO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092011	KATEKAN	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092012	BANJARSARI	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092013	MEDARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092014	KARANGGEDON G	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092015	MUNGGANGSAR I	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092016	KATAAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092017	PETIREJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092018	PRINGAPUS	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332309	NGADIREJO	3323092020	GEJAGAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102001	JUMO	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102002	JAMUSAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102003	KERTOSARI	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102004	GIYONO	MAJU

33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102005	GUNUNGGEMPOL	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102006	PADURESO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102007	BARANG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102008	JOMBOR	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102009	KETITANG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102010	MOROBONGO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102011	KARANGTEJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102012	SUKOMARTO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332310	JUMO	3323102013	GEDONGSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112001	TRETEP	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112002	DONOROJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112003	NGLARANGAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112004	SIGEDONG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112005	BONJOR	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112006	TEMPELSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112007	CAMPUREJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112008	BOJONG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112009	BENDUNGAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112010	SIMPAR	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332311	TRETEP	3323112011	TLOGO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122001	CANDIROTO	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122002	LEMPUYANG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122003	CANGGAL	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122004	KENTENGSAARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122005	NGABEYAN	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122006	BANTIR	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122007	KRAWITAN	MAJU

33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122008	MUNTUNG	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122009	BATURSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122010	MENTO	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122011	MUNENG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122012	PLOSOGADEN	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122013	SIDOHARJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332312	CANDIROTO	3323122014	GUNUNGPAYUNG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132002	BADRAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132003	BENGKAL	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132004	PARE	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132005	NGUWET	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132006	NGROPOH	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132007	PENDOWO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132008	SANGGRAHAN	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132009	KLEPU	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132010	KEMLOKO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132011	GENTAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132012	KRAMAT	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332313	KRANGGAN	3323132013	PURWOSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULYO	3323142001	TLOGOMULYO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULYO	3323142002	CANDISARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULYO	3323142003	SRIWUNGU	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULYO	3323142004	LANGGENG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULYO	3323142005	TANJUNGSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULYO	3323142006	LOSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULYO	3323142007	BALEREJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULYO	3323142008	KEROKAN	BERKEMBANG

33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULO	3323142009	LEGOKSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULO	3323142010	TLILIR	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULO	3323142011	GEDEGAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332314	TLOGOMULO	3323142012	PAGERSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152001	SELOPAMPANG	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152002	TANGGULANOM	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152003	JETIS	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152004	SALAMREJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152005	NGADITIRTO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152006	BULAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152007	KACEPIT	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152008	GAMBASAN	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152009	BUMIAYU	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152010	KEBONAGUNG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152011	BAGUSAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332315	SELOPAMPANG	3323152012	PLUMBON	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162001	BANSARI	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162002	MOJOSARI	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162003	REJOSARI	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162004	GUNUNGSARI	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162005	BALESARI	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162006	PURBOREJO	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162007	TLOGOWERO	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162008	MRANGGEN KIDUL	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162009	MRANGGEN TENGAH	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162010	CANDISARI	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162011	CAMPURANOM	MAJU

33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162012	GENTINGSARI	MANDIRI
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332316	BANSARI	3323162013	TANUREJO	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172001	KLEDUNG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172002	KALIREJO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172003	PAPONAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172004	JEKETRO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172005	KWADUNGAN GUNUNG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172006	KWADUNGAN JURANG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172007	TLAHAB	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172008	PETARANGAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172009	CANGGAL	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172010	JAMBU	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172011	KRUWISAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172012	BATURSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332317	KLEDUNG	3323172013	TUKSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182001	BEJEN	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182002	BANJARSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182003	JLEGONG	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182004	PRANGKOKAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182005	LOWUNGU	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182006	LARANGAN LUWOK	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182007	CONGKRANG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182008	KEBONDALEM	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182009	KEMUNING	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182010	SELOSABRANG	MAJU
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182011	TANJUNGSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182012	PETUNG	BERKEMBANG

33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182013	DUREN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332318	BEJEN	3323182014	NGALIYAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192001	WONOBOYO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192002	PATEKEN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192003	PITROSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192004	PURWOSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192005	KEBONSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192006	SEMEN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192007	TENING	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192008	WONOCOYO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192009	PESANTREN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192010	REJOSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192011	TAWANGSARI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192012	CEMORO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332319	WONOBOYO	3323192013	WATES	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202001	GEMAWANG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202002	MUNCAR	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202003	KEMIRIOMBO	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202004	NGADISEPI	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202005	KREMPONG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202006	SUCEN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202007	KARANGSENEG	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202008	BANARAN	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202009	KALIBANGER	BERKEMBANG
33	JAWA TENGAH	3323	KABUPATEN TEMANGGUNG	332320	GEMAWANG	3323202010	JAMBON	BERKEMBANG

D. sosial ,ekonomi , dan ekologi tetapi belum mampu mengelolannya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa , kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemeiskinan .desa

berkembang atau desa Madya adalah desa yang memiliki indek desa membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989

- E. Desa tertinggal atau desa pra madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial ,ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa , kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya .desa tertinggal atai desa pra madya adalah desa yang memiliki indek desa membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,59889,dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.
- F. Desa sangat tertinggal atau yang disebut desa pratama adalah desa yang mengalami kerentangan karena masalah bencana alam , guncangan ekonomi , dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial , ekonomi ,dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya . desa sangat tertinggal atau desa pratama adalah desa yang memilkimindek desa membangun kurang dan lebih kecil (\leq) dari 0, 4907.

Dilihat dari kriteria desa diatas , dikabupaten Temanggung tersebar di 266 desa. Indek desa membangun di kabupaten Temanggung berdasarkan kriteria IDM adalah sebagai berikut

1. Kategori desa Mandiri di kabupaten Temanggung ada 10 desa
2. Kategori desa berkembang dikabupaten Temanggung ada 195
3. Kategori desa Maju dikabupaten Temanggung ada 61
4. Kategori desa tertinggal di kabupaten Temanggung tidak ada ,dan
5. Kategori desa sangat tertinggal sudah tidak ada

Yang terlihat dalam tabel berikut ini

Jumlah kampung KB yang telah dicanangkan sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 26

Data kampung KB
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	LOKASI			PENCANANGA N	STATUS IDM
	KECAMATAN	DUSUN	RW- DESA/KEL	TANGGAL	
1	2	3	4	5	5
1	Bansari	Dusun Mranggen RW 01	Desa Mranggen Kidul	21/03/2016	Maju
2	Bansari	Dusun Tegalrukem	Desa Campuranom	31/07/2017	Berkembang
3	Bansari	Dusun Sempon	Desa Rejosari	15/11/2018	Maju
4	Bejen	Dusun Kemuning	Desa Kemuning	17/02/2016	Berkembang
5	Bejen	Dusun Selosabrang	Desa Selosabrang	25/07/2017	Berkembang
6	Bejen	Dusun Kecer	Desa Lowungu	26/09/2018	Berkembang
7	Bejen	Dusun Krajan,	Desa Ngaliyan	02/10/2019	Berkembang
8	Bulu	Dusun Wonotirto	Desa Wonotirto	23/02/2016	Berkembang
9	Bulu	Dusun Dukuh	Desa Wonosari	27/04/2017	Maju
10	Bulu	Dusun Krasak	Desa Tegalrejo	29/08/2018	Berkembang
11	Candirototo	Dusun Ngabeyan	Desa Ngabeyan	29/03/2016	Berkembang
12	Candirototo	Dusun Muntung	Desa Muntung	03/05/2017	Maju
13	Candirototo	Dusun Sritanjung	Desa Sidoharjo	08/05/2018	Berkembang
14	Candirototo	Dusun Krecek	Desa Batur Sari Kec. Candirototo	22/08/2019	Berkembang
15	Gemawang	Dusun Dermonganti	Desa Gemawang	11/01/2016	Maju
16	Gemawang	Dusun Kemiriombo	Desa Kemiriombo	15/05/2017	Berkembang
17	Gemawang	Dusun Kalibanger	Desa Kalibanger	11/08/2018	Berkembang
18	Jumo	Dusun Kali Salam	Desa Ketitang	27/02/2016	Berkembang
19	Jumo	Dusun Lempong	Desa Karangtejo	09/08/2017	Berkembang
20	Jumo	Dusun Sukosarono	Desa Jombor	20/08/2018	Berkembang
21	Kaloran	Dusun Mlondang RW 06	Desa Gandon	24/02/2016	Maju
22	Kaloran	Dusun Jangkungan	Desa Kemiri	27/04/2017	Berkembang
23	Kaloran	Dusun Jetis	Desa Geblog	13/09/2018	Berkembang
24	Kandangan	Dusun Sodong RW 08	Desa Gesing	01/03/2016	Berkembang
25	Kandangan	Dusun Baledu	Desa Baledu	01/08/2017	Berkembang

26	Kandangan	Dusun Gedongan	Desa Ngemplak	30/10/2018	Maju
27	Kedu	Dusun Wolodono	Desa Karangtejo	29/02/2016	Berkembang
28	Kedu	Dusun kundisari RW 2	Desa Kundisari	03/08/2017	Berkembang
29	Kedu	Dusun Bringin	Desa Tegalsari Kec. Kedu	19/11/2018	Berkembang
30	Kedu	Dusun Bandunggede	Desa Bandunggede	08/04/2019	Berkembang
31	Kledung	Dusun Mayongan	Desa Jeketro	30/03/2016	Berkembang
32	Kledung	Dusun sanggrahan	Desa Kalirejo	30/08/2017	Berkembang
33	Kledung	Rw. 1	Desa Kruwisan	16/11/2018	Berkembang
34	Kranggan	Dusun Ngabean Paingan	Desa Kemloko	23/01/2016	Berkembang
35	Kranggan	Dusun Kramat	Desa Kramat	10/05/2017	Berkembang
36	Kranggan	Dusun Getasan (dana mandiri)	Desa Ngropoh	14/11/2018	Berkembang
37	Kranggan	Dusun Klepu	Desa Klepu	21/11/2018	Berkembang
38	Kranggan	Dusun Purwosari II	Desa Purwosari	04/04/2019	Berkembang
39	Ngadirejo	Dusun Karangrejo	Desa Gondang Winangun	28/01/2016	Maju
40	Ngadirejo	Dusun Butuh	Desa Banjarsari	26/05/2017	Maju
41	Ngadirejo	Desa Mungangsari	Desa Mungangsari	09/11/2018	Berkembang
42	Parakan	Dusun Gamblok	Desa Traji	27/02/2016	Mandiri
43	Parakan	Dusun Gamblok	Desa Glapansari	13/07/2017	Berkembang
44	Parakan	Dusun Pringlimit	Desa Bagus	31/07/2018	Berkembang
45	Pringsurat	Dusun Pondoh	Desa Rejosari	24/02/2016	Mandiri
46	Pringsurat	Dusun Krajan	Desa Soborejo	26/04/2017	Berkembang
47	Pringsurat	Dusun Krajan	Desa Pagergunung	10/10/2018	Berkembang
48	Selopampang	Dusun Ganjuran RW 03	Desa Bulan	17/02/2016	Berkembang
49	Selopampang	Dusun Jetis 2	Desa Jetis	21/08/2017	Berkembang
50	Selopampang	Dusun Salam Wetan	Desa Salam Rejo	28/11/2018	Berkembang
51	Temanggung	Lingk Jampiroso	Kelurahan Jampiroso	23/05/2017	-
52	Temanggung	Dusun Gender RW 02	Kelurahan Walitelon Utara	28/01/2016	-
53	Tembarak	Dusun Genayan RW 01	Desa Tawang Sari	23/01/2016	Berkembang
54	Tembarak	Dusun Menggoro	Desa Menggoro	04/05/2017	Maju
55	Tembarak	Dusun Kuwaton	Desa Purwodadi	04/10/2018	Berkembang

56	Tlogomulyo	Dusun Kwadakan	Desa Kerokan	23/10/2017	Berkembang
57	Tlogomulyo	Dusun Talun	Desa Pagersari	10/07/2018	Berkembang
58	Tlogomulyo	Dusun Balong	Desa Langgeng	14/01/2016	Berkembang
59	Tretep	Dusun Sigedong	Desa Sigedong	13/01/2016	Berkembang
60	Tretep	Dusun Sekidang	Desa Tempelsari	27/04/2017	Berkembang
61	Tretep	Dusun Bojong	Desa Bojong	29/10/2018	Berkembang
62	Wonoboyo	Dsn Kleseman	Desa Wonoboyo	26/01/2016	Berkembang
63	Wonoboyo	Dusun Wanasari 2	Desa Tening	18/05/2017	Berkembang
64	Wonoboyo	Dusun krajan	Desa Pitrosari	18/09/2018	Berkembang
65	Bulu	Dusun Reban	Desa Malangsari	26/8/2019	Berkembang
66	Gemawang	Dusun jambon	Jambon	2020	Berkembang

Desa Maju : 10 Desa

Desa Berkembang : 54 Desa

Kelurahan : 2 Kelurahan

Tabel 27

Presentase kampung KB yang memenuhi IDM Kabupaten Temanggung
Tahun 2015 s.d 2021 Triwulan IV

N0	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kampung KB	na	na	20	40	65	66
2	Jumlah Desa dengan kriteria desa berkembang dan tertinggal	na	na	219	219	218	195
3	Persentase	na	na	9,13	18,26	29,82	33,85

Sumber: DPPKBPPA dan Dispermades Kabupaten Temanggung

Indek Desa Membangun di kabupaten Temanggung yang terdiri dari 3 kriteria IDM meliputi :

1. kriteria IDM desa tertinggal tidak ada
2. desa berkembang ada 195
3. desa maju ada 61, dan
4. desa mandiri ada 10 desa.

Dari seluruh jumlah desa di kabupaten Temanggung yang sudah ada kampung KB nya sebanyak 66 desa , dari 66 desa kampung KB sebagian besar masuk kriteria desa berkembang sebanyak 54 desa, desa tertinggal sudah tidak ada , desa maju sebanyak 8desa,desa mandiri 2 desa dan kampung KB yang

ada di luarahan ada 2 kelurahan . Persentase jumlah kampung KB di desa IDM terdiri dari 3.03 % di desa mandiri, 81.82% di desa Berkembang dan 12.12 % di desa maju.

Sesuai acuan dan tujuan dari pembentukan kampung KB , diprioritaskan di desa yang sangat tertinggal dan baru berkembang , agar menjadi desa yang maju dan mandiri . maka dari tabel diatas persentase desa kampung KB , adalah dari jumlah kampung KB yang terbentuk dibandingkan desa IDM dengan kriteria tertinggal dan berkembang yaitu sebesar 33,35% . Jumlah tersebut merupakan total pengembangan keseluruhan kampung KB yang ada di temanggung sejak tahun 2016 hingga 2019. Dan untuk selanjutnya kegiatan kampung KB ini untuk kegiatan pengembangan dan pemantapan kampung KB yang sudah dicanangkan untuk pencaanangan kampung KB selanjutnya diarahkan dengan menggunakan dana desa yang ada dan bersifat mandiri

Faktor Penghambat Kampung KB

1. Belum adanya Perbup kampung KB
2. Kurang nya Sosialisasi pengembangan kampung KB pada lintas sektor , OPD
3. Tidak adanya dana APBN untuk pembentukan kampung KB
4. Kurangnya koordinasi di lini lapangan, dari PKB, Desa, pokja kampung KB , linsek kec dan masyarakat
5. Belum semua pokja kampung KB mendapatkan pelatihan kampung KB
6. Belum semua desa kampung KB mau mengembangkan Kampung KB dari setara dusun menjadi setara desa,
7. Kurangnya sosialisasi pada masyarakat tentang pengembangan kampung KB

Faktor Pendorong dalam Kampung KB

1. Adanya potensi kader di kampung Kb yg bisa di berdayakan
2. Adanya dana desa yg bisa di anggarkan untuk pengembangan kampung KB
3. Adanya dukungan dari masyarakat
4. Adanya dukungan dari stakeholder, toma, toga
5. Adanya Tim Pengembangan kampung KB kabupaten

Rencana Tindak Lanjut Kampung KB

1. Meningkatkan frekuensi advokasi dan KIE bagi lintas sektor atau OPD
2. Mengadakan Sosialisasi tentang Pengembangan kampung KB pada pokja kampung kb, linsek, masyarakat.

3. Mengadakan pelatihan bagi pokja kampung KB
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembinaan di kampung KB
5. Mengadakan Monev kampung

12. **Indek Pembangunan Keluarga { IPK/i Bangsa }**

Pembangunan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Diperlukan adanya sebuah ukuran untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas keluarga tersebut, yaitu dengan Indeks Pembangunan Keluarga atau i Bangsa,

Adapun Indeks Pembangunan Keluarga adalah: pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, salah satu yang dihasilkan oleh i Bangsa adalah terpotretnya gambaran akan peran dan fungsi keluarga.

Rumus Indeks Pembangunan Keluarga menggunakan pendekatan dimensi yang dibentuk dari 17 Variabel, 3 dimensi yang ditentukan mencakup:

1. Dimensi Ketentraman
2. Dimensi Kemandirian
3. Dimensi Kebahagiaan

Setelah semua nilai – nilainya distandarisasi dengan menggunakan persamaan diatas, selanjutnya menghitung nilai komposifmading masing dimensi dengan menggunakan persamaan berikut;

$$D_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j$$

Rata rata aritmatika

Langkah terakhir adalah menghitung nilai indeks Pembangunan Keluarga dengan menggunakan rata –rata:

$$IBangga = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 D_i$$

Indek Pembangunan Keluarga / i Bangga Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 , sebesar 55 ,97 , perhitungan ini dilakukan oleh BKKBN , dengan menggunakan dasar PK21 atau pendataan tahun 2021, angka tersebut sudah menunjukkan angka yang baik dibandingkan beberapa kota di Jawa Tengah , hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 28
Indek Pembangunan Keluarga /i Bangga

PROVINSI/ KOTA	Indeks Ketentraman	Indeks Kemandirian	Indeks Kebahagiaan	Ibangga
JAWA TENGAH				
BANYUMAS	58,55	54,68	55,40	56,21
PURBALINGGA	57,47	54,38	54,71	55,52
CILACAP	58,41	54,65	55,26	56,11
BANJARNEGARA	57,69	54,54	54,95	55,73
MAGELANG	58,84	54,68	55,29	56,27
TEMANGGUNG	58,04	54,60	55,28	55,97
WONOSOBO	57,98	54,57	55,15	55,90
PURWOREJO	60,00	55,00	56,08	57,03
KEBUMEN	58,51	54,65	55,11	56,09
PEKALONGAN	57,66	54,34	54,52	55,51
PEMALANG	57,38	54,28	54,45	55,37
TEGAL	56,78	54,01	53,93	54,91
BREBES	56,24	54,02	53,70	54,65
SEMARANG	58,58	54,64	55,40	56,21
KENDAL	58,78	54,67	55,36	56,27
DEMAK	58,03	54,38	54,77	55,73
GROBOGAN	58,87	54,79	55,86	56,51
PATI	59,66	54,85	55,99	56,83
JEPARA	58,13	54,25	54,98	55,79
REMBANG	57,98	54,55	55,06	55,86
BLORA	59,03	54,87	55,98	56,63
KUDUS	58,70	54,46	55,00	56,05
KLATEN	60,06	54,95	56,05	57,02
BOYOLALI	58,57	54,72	55,43	56,24
SRAGEN	59,49	54,89	55,98	56,79
SUKOHARJO	58,69	54,68	55,19	56,19
KARANGANYAR	58,42	54,69	55,28	56,13
WONOGIRI	59,26	55,20	56,34	56,93
BATANG	57,74	54,48	54,91	55,71
KOTA SEMARANG	58,86	54,61	55,04	56,17
KOTA SURAKARTA	61,41	55,08	56,42	57,63
KOTA PEKALONGAN	59,15	54,47	55,18	56,27
KOTA MAGELANG	61,22	55,07	56,20	57,50
KOTA TEGAL	59,48	54,56	55,61	56,55
KOTA SALATIGA	59,69	54,76	55,65	56,70

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPAPPKB

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan DPPAPPKB dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPAPPKB sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja DPPAPPKB dari 20 indikator terdapat 7 indikator Telah Tercapai 100 %, Akan Tercapai 12 Indikator dan 1 Indikator belum mencapai.

Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana adalah sebagai berikut ; Berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara umum memiliki Fungsi Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi DPPKBPPPA dimaksud, maka dalam mencapai keberhasilan strategik ini diwujudkan melalui kegiatan pendekatan kemasyarakatan kuantitas, kualitas, keluarga, wilayah paripurna, desentralisasi manajemen pendekatan koordinasi aktif, kemandirian dan kemitraan. Strategik khusus ini bertujuan memperluas jaringan pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan sampai tingkat pedesaan, mempertajam pelayanan program kelompok sasaran Sejahtera III, meningkatkan pelayanan KB yang berkualitas, peningkatan peserta kb dengan metode kontrasepsi jangka panjang , memantapkan dan mengembangkan kampung KB menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak , mewujudkan kecamatan dan desa layak anak ,meningkatkan PUG dan ARG , meningkatkan pelayanan KIE, kegiatan Bina Keluarga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program ekonomi produktif t yaitu “UPPKS“ secara bertahap sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan.

Secara singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana memiliki

mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya yaitu: Merumusan kebijakan teknis dibidang Pembinaan umum dan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.

1. Pembinaan terhadap lembaga-lembaga perangkat daerah dibidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Sejahtera;
 2. Penyelenggaraan pelayanan umum daerah dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 3. Penyelenggaraan penyusunan data dan informasi daerah dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas daerah dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 5. Penyelenggaraan kesekretariatan daerah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPPPAPPKB antara lain :
1. Masih Rendahnya pemahaman masyarakat tentang program KKBPK Terutama generasi muda tentang persiapan dan perencanaan kehidupan Berkeluarga , yang berakibat masuhnya tinggi angka pernikahan dibawah Umur
 2. Masih tingginya PUS dibawah umur 20 Tahun
 3. Masih tinggi PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi (Unmet need)
 4. Rasio jumlah PKB dilapangan dibandingkan dengan jumlah desa yang ada belum memenuhi standar yang diharapkan , karena saat ini jumlah PKB dengan jumlah desa yang ada 1 PKB membina 7 sampai 10 desa, harapannya adalah 1 PKB 2 sampai 3 desa
 5. Masih rendahnya cakupan desa kampung KB yang memenuhi IDM (indeks Desa membangun)

6. Terbatasnya anggaran sehingga tidak semua kegiatan dapat terlaksana semaksimal mungkin.
7. Masih lemahnya keterlibatan lintas sektoral dalam mendukung program KKBPK dan Pemberdayaan dan perlindungan anak
8. Belum adanya Perda tentang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Masih rendahnya penghasilan perempuan sebagai salah satu indikator IPG (indeks pembangunan gender)
10. Harapan lama sekolah bagi perempuan masih rendah
11. Partisipasi Perempuan dalam pemerintah dipengaruhi peluang seleksi
12. Masih rendahnya persentase PD dalam merencanakan anggaran yang responsif gender /ARG
13. Kemampuan dan keterbasan petugas dalam pendampingan Kasus KDRT

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal DPPPAPPKB), yaitu sejumlah 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana table 2.3 berikut:

Tabel 29

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
A.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					581.397.000	A.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					641.397.000	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					30.000.000		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					60.000.000	
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota							Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					30.000.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)				30.000.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					30.000.000		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					30.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000.000			30.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					30.000.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					187.497.000		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					187.497.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten /Kota					56.475.000		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten /Kota					56.475.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			56.475.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			56.475.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					131.022.000		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					131.022.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan			131.022.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan			131.022.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi					Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi				
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			30.000.000		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			60.000.000 30.000.000 30.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			a							ta				
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					30.000.000		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					30.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			30.000.000		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			30.000.000	
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					20.000.000		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					20000000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					20.000.000		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					20000000	
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			20000000		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			20000000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					314303000		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					94.878.000		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					314303000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12	bln	50000000		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Bln	50.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		keg	56.475.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		keg	56.475.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		a			131.022.000		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kewenangan Kabupaten/Kota			131.022.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Pendampingan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi			131.022.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Pendampingan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi			131.022.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					76.806.000		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					76.806.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					76.806.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksannnya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	12 bulan	bln	76.806.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN									
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an		
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.136.394.008		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.236.717.008	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.392.279.192		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.392.279.192	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14	bln	3.392.279.192		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bln	3.392.279.192			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						25.323.000		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	keg			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Keg	25.323.000			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						62.600.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah						77.600.000		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	2.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Bln	2.000.000			

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Bln		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	11.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Bln	11.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	9.820.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Bln	9.820.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	14.030.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Bln	29.030.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	25.750.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Bln	25.750.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					616.514.816		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					616.514.816	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	12.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	12.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	39.100.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Bln	39.100.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	10.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Bln	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	555.414.816		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Bln	555.414.816	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					65.000.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					125.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	15.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Bln	15.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	40.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Bln	40.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	bln	5.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12	Bln	65.000.000	
				12	bln	5.000.000					12	Bln	5.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					206.350.000		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					301.605.000	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					95.255.000	
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				95.255.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					206.350.000		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					206.350.000	
	Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	DPPPAPPKB Kab Temanggung	Terlaksannnya Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	12	Bulan	6000000		Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	DPPPAPP KB Kab Temanggung	Terlaksannnya Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	12	Bulan	60.000.000	Nomenklatur baru
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	bln	29.550.000		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	Bln	29.550.000	
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	bln	116.800.000		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	Bln	116.800.000	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					6.217.837.000		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					6.292.837.000	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal					1.100.015.200		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal					1.175.015.200	
	Advokasi Program KKBPK kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga,	1	kegiatan	4.378.800		Advokasi Program KKBPK kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga,	1	kegiatan	79.374.800	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kependudukan , dan Keluarga Berencana) kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan , dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	3	kegiatan	25.000.000		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Temanggun g, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kependuduka n, dan Keluarga Berencana) kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembanguna n Keluarga, Kependuduka n, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	3	kegiatan	25.000.000	
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan , dan Keluarga Berencana)					Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembanguna n Keluarga, Kependuduka n, dan Keluarga Berencana)				

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3	kegiatan	70.640.000		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3	kegiatan	70.640.000	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12	bulan	312.000.000		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12	Bulan	312.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12	bulan	648.000.400		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12	Bulan	648.000.400	Menyesui kan kemenda gri
	Pengendalian Program KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	3	kegiatan	40.000.000		Pengendalian Program KKBPK	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	3	kegiatan	40.000.000	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					1.387.200.000		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					1.387.200.000	
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)/PENUNJANG DAK	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas	5	kegiatan			Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)/PENUNJANG DAK	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	5	kegiatan		

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Keluarga Berencana/Pen yuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	12	BULAN	1.387.200.000		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	untuk Petugas Keluarga Berencana/Pe nyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	12	BULAN	1.387.200.000	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota					2.626.621.400		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota					2.626.621.400	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	Faskes di kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusia n Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	12	BULAN	13.950.000		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	Faskes di kabupaten Temanggun g	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusia n Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	12	BULAN	13.950.000	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi	12	BULAN	1.580.285.800		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi	12	BULAN	1.580.285.800	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	(MKJP)		Jangka Panjang (MKJP)					(MKJP)		Jangka Panjang (MKJP)				
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	5	kegiatan	1.165.764.600		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	5	kegiatan	1.165.764.600	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Faskes di kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	3	kegiatan	12.600.000		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Faskes di kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	3	kegiatan	12.600.000	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					1.104.000.000		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					1.104.000.000	
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	64	Kampung KB	1.104.000.000		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	64	Kampung KB	1.104.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					4.300.040.000		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					4.400.040.000	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					4.250.040.000		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					4.250.040.000	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	lokus stunting kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30	desa	480.000.000		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	lokus stunting kabupaten Temanggung	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30	desa	480.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3 kecamatan di kabupaten Temanggung	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3	KEG	237.000.000		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3 kecamatan di kabupaten Temanggung	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3	KEG	237.000.000	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12	bulan	3.533.040.000		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12	Bulan	3.533.040.000	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	12	bln			Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	12	bln		

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
	PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)					PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)					
	Pelaksanaan Ketahanan Keluarga	Pembangunan dan Kesejahteraan Keluarga	Keluarga	Melalui Pembinaan		50.000.000		Pelaksanaan Ketahanan Keluarga	Pembangunan dan Kesejahteraan Keluarga	Keluarga	Melalui Pembinaan		50.000.000		
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ LOKUS STUNTING				50.000.000		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ LOKUS STUNTING			12	bln	50.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Kesejahteraan Keluarga							Kesejahteraan Keluarga						
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0		Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23	Keg	100.000.000	
			Jumlah			15.442.421.008				Jumlah			15.872.999.008	

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh DPPPAPPKB. Namun dalam proses ini DPPPAPPKB mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh DPPPAPPKB terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel. 30

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kranggan	Terlaksannnya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	87.000.000	
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pringsurat	Terlaksannnya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100.000.000	
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Bulu	Terlaksannnya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UP	50.000.000	
	Total			237.000.000	

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di DPPPAPPKB belum ada yang dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
	NIHIL						
1							
2							

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui DPPAPPKB ada ... Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 32
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019-2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Penghargaan Anugrah Parahita Eka Praya Tingkat Utama Tahun 2021	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Nasional	DPPKBPPA
2	Kabupaten Layak Anak , Kategori Madya , Tahun 2021	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Nasional	DPPKBPPA

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh DPPAPPKB lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui Program dan kegiatan yang mendukung percepatan penghapusan kemiskinan di kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPPAPPKB

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari penyusunan Renja DPPAPPKB ;

- 1) Mewujudkan masyarakat perdesaan dan perkotaan yang Agamis berbudaya dan sejahtera
- 2) Mewujudkan masyarakat Temanggung yang marem ,tentrem dan gendem
- 3) Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
- 4) Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 5) Terwujudnya kota layak anak (KLA)
- 6) Meningkatkan pengarusutamaan gender (PUG) dan Anggaran responsif gender (ARG) dalam proses perencanaan pembangunan .
- 7) Menurunkan angka pernikahan remaja
- 8) Meningkatkan kepesertaan KB
- 9) Meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi MKJP
- 10) Meningkatkan kualitas dan pembinaan ketahanan keluarga
- 11) Meningkatkan prosentase terbentunya kampung KB yang memenuhi indek Desa Membangun (IDM)
- 12) Menurunkan prevalensi stunting di kabupaten Temanggung
- 13) Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di DPPAPPKB dalam rangka akuntabilitas kinerja DPPAPPKB .
- 14) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target DPPPAPPKB Kab. Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi DPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2023

VISI DPPAPPKB KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023
 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2021	TARGET KONDISI AKHIR 2021
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Penyediaan data mikro keluarga di desa atau kelurahan	%	100	100
				Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun	%	100	100
				Presentase Usia Perkawinan Pasangan Usia Subur (PUS) Kurang dari 20 tahun	%	2,06	100
				Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet need)	%	9,83	67,89
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif	%	75,87

		Peserta KB MKJP di Kab Temanggung	%	48,54	93,14
		Rasio pembantu pembina keluarga berencana desa / kelurahan	%	100	100
		Cakupan Sasaran PUS Menjadi Peserta KB Baru	%	85,00	76,00
		Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pria	%	3,55	4,00
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Ber-KB	%	81,25	80,00
		Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) ber-KB	%	86,00	85,00
		Cakupan Kampung KB di Desa IDM	%	33,9	99,84

				Persentase IPK	%	40	55,57	
	Meningkatkan Pengarustamaan Gender dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya kesetaraan gender	Program Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	95,64	99,65	
				Persentase perangkat daerah yang melakukan PPRG	%	38,57	100	
				Persentase keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten	%	31,11	86,53	
				Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban terhadap perempuan	%	0,013	100
		Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase korban kekerasan terhadap anak	%	0,011	100
				Program Pemenuhan Hak Anak /PHA)	Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	%	30,00	100

	Persentase terbentuknya desa layak anak	%	4,15	2,77
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rasio Kekerasan dalam rumah tangga	%	1:42000	1:5601

Sumber : Perubahan renstra DPPAPPKB) Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi DPPAPPKB Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Perubahan renstra DPPAPPKB Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi DPPAPPKB Tahun 2019-2023.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan DPPAPPKB Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan DPPAPPKB Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2023.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja DPPAPPKB Tahun 2023 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
(DPPPAPPKB) Kab. Temanggung Tahun 2023

RANCANGAN RENJA (PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023		
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	641.800.000		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	641.800.000
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	60.000.000		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	60.000.000
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	30.000.000		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	30.000.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	187.497.000		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	187.497.000
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	56.475.000		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	56.475.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	56.475.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	56.475.000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	131.022.000		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	131.022.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	131.022.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	131.022.000
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	60.000.000		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	60.000.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	20.000.000		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	20.000.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	20.000.000		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	20.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	314.303.000		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	314.303.000
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	106.475.000		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	106.475.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	56.475.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	56.475.000
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	131.022.000		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	131.022.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten /Kota	131.022.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten /Kota	131.022.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.806.000		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.806.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.806.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.806.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.236.717.008			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.236.717.008
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.392.279.192			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.392.279.192
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.392.279.192			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.392.279.192
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.323.000			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.323.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25.323.000			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25.323.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.600.000			Administrasi Umum Perangkat Daerah	77.600.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.000.000			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.820.000			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.820.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.030.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.030.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.750.000			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.750.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	616.514.816			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	616.514.816
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.100.000			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.100.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	555.414.816			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	555.414.816
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.000.000			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	301.605.000		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	301.605.000
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	95.255.000		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	95.255.000
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	95.255.000		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	95.255.000
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	206.350.000		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	206.350.000
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	29.550.000		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	29.550.000
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	116.800.000		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	116.800.000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.292.837.000		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.292.837.000
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.175.015.200		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.175.015.200
Advokasi Program KKBPK kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	79.374.800		Advokasi Program KKBPK kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	79.374.800
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK			Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.640.000		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.640.000

Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	312.000.000		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	312.000.000
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	648.000.400		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	648.000.400
Pengendalian Program KKBPK	40.000.000		Pengendalian Program KKBPK	40.000.000
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.387.200.000		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.387.200.000
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.387.200.000		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.387.200.000
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.626.621.800		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.626.621.800
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.950.000		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.950.000
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.540.285.800		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.540.285.800
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.1059.786.000		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.059.786.000
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.600.000		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.600.000
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.104.000.000		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.104.000.000
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.104.000.000		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.104.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.400.040.000		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.400.040.000
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.250.040.000		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.250.040.000
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	480.000.000		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	480.000.000

Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	237.000.000		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	237.000.000	
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.533.040.000		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.533.040.000	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	50.000.000		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	50.000.000	
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50.000.000		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50.000.000	
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100.000.000		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100.000.000	
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100.000.000		Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100.000.000	
Jumlah	15.872.999.008		Jumlah	15.872.999.008	

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2023

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2023 sebesar Rp. 430.578.000 Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan Belanja operasional dikarenakan untuk pendukung kegiatan penurunan stunting, penyusunan GDPK, dan penguatan mitra kerja yaitu kegiatan Pilihan duta genre dalam rangka mendukung kampanye PUP, KRR dan jo kawin bocah.

Tabel 35
Rencana Program dan Kegiatan DPPAPPKB Kabupaten Temanggung
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator program,kegiatan dan sub kegiatan	Rencana Tahun 2023				alokasi anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana				
			Lokasi Output Kegiatan	target kinerja	satuan	Pagu Indikatif (Rp.)		Alokasi	Realisasi	%						
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				641.800.000	533.397.000	97.149.520	93.047.970	669	525.325.000				
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				60.000.000	75.000.000	41.918.320	41.391.870	198	90.000.000				
2	8	2	2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				30.000.000	50.000.000	12.943.920	12.876.420	99	50.000.000			
2	8	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20/266	Kecamat an/Desa Keluraha n	30.000.000	50.000.000	12.943.920	12.876.420	99	25.000.000	DAU
2	8	2	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				30.000.000	25.000.000	28.974.400	28.515.450	98	40.000.000			
2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20/266	Kecamat an/Desa Keluraha n	30.000.000	25.000.000	28.974.400	28.515.450	98	40.000.000		
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				187.497.000	187.497.000	28.100.000	26.150.500	279	169.425.000				
2	8	3	2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				56.475.000	56.475.000	9.300.000	9.282.150	100				

2	8	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20/266	Kecamatan/Desa Kelurahan	56.475.000	56.475.000	-	-	-	56.475.000	duk	
2	8	3	2.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20/266	Kecamatan/Desa Kelurahan	-	9.300.000	9.282.150	100	10.000.000			
2	8	3	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						131.022.000	131.022.000	9.400.000	7.476.100	80	131.022.000	
2	8	3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi Sinkronisasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20/266	Kecamatan/Desa Kelurahan	131.022.000	131.022.000	9.400.000	7.476.100	80	131.022.000		
2	8	3	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						-	-	9.400.000	9.392.250	100	38.403.000	
2	8	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20/266	Kecamatan/Desa Kelurahan		9.400.000	9.392.250	100	38.403.000			
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						60.000.000	25.000.000	-	-	-	40.000.000	

2	08	04	201		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					30.000.000	25.000.000	-	-	-	40.000.000	
2	08	04	201	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20/266	Kecamatan/Desa Kelurahan	30.000.000						
2	08	04	202		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				0	30.000.000	25.000.000	-	-	-	40.000.000	
2	8	4	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20/266	Kecamatan/Desa Kelurahan	30.000.000	25.000.000	-	-	-	40.000.000	
2	8	4	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				0	-	-	18.600.000	18.534.450	100	20.000.000	
2	8	4	2.03	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20/266	Kecamatan/Desa Kelurahan	-	-	18.600.000	18.534.450	100	20.000.000	
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					20.000.000	20.000.000	20.000.000	18.429.800	92	25.000.000	
2	08	06	202		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					20.000.000	20.000.000	20.000.000	18.429.800	92	25.000.000	
2	08	06	202	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		20/266	Kecamatan/Desa Kelurahan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	18.429.800	92	25.000.000	DAU
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					314.303.000	225.900.000	7.131.200	7.075.800	99	225.900.000	

2	8	7	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					106.475.000	94.878.000	7.131.200	7.075.800	99	94.878.000	
2	8	7	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	Bln	50.000.000	38403000	7.131.200	7.075.800	99	38.403.000	dak, dau
2	08	07	201	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Keg	56.475.000	56.475.000	-	-	-	56.475.000	dak
2	08	07	202		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					131.022.000	131.022.000	-	-	-	131.022.000	
2	08	07	202	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Pendampingan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			131.022.000	131.022.000	-	-	-	131.022.000	dak
2	08	07	203		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					76.806.000						

2	14	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	11.000.000	11.000.000	11.459.302	11.181.552	98	20.000.000	
2	14	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	9.820.000	6.000.000	6.060.725	6.052.725	100	12.000.000	
2	14	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jamuan makan dan minum Tamu yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	29.030.000	15.000.000	6.548.374	6.490.360	99	15.000.000	
2	14	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Personal dan SKPD yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	25.750.000	30.000.000	7.442.800	7.324.520	98	30.000.000	
2	14	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						616.514.816	618.180.000	498.579.338	466.795.734	94	630.571.554
2	14	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	12.000.000	8.000.000	8.677.588	3.726.448	43	15.000.000	
2	14	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan biaya Telepone,air dan Listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	39.100.000	39.100.000	39.100.000	29.654.682	76	39.100.000	
2	14	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	10.000.000	5.000.000	9.400.000	9.085.000	97	10.000.000	

2	14	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jamuan makan dan minum Tamu yang tersedia	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	555.414.816	566.080.000	441.401.750	424.329.604	96	566.471.554	
2	14	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						125.000.000	61.900.000	80.800.000	76.434.980	95	90.000.000
2	14	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas dan Kendaraan Operasional yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	15.000.000	16.900.000	15.000.000	14.963.000	100	15.000.000	
2	14	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak Kendaraan dinas/Operasional Roda 4 yang terbayarkan. Jumlah Pajak Kendaraan dinas/Operasional Roda 2 yang terbayarkan.	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	40.000.000	40.000.000	37.600.000	35.534.000	95	40.000.000	
2	14	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	65.000.000	-	18.800.000	16.643.230	-	15.000.000	
2	14	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan yang tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	5.000.000	5.000.000	9.400.000	9.294.750	99	20.000.000	
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						301.605.000	146.350.000	38.288.000	37.966.700	99,16	146.350.000
2	14	2	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						95.255.000					

2	14	2	2.01	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	tersusunnya dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	DPPPAPPKB kab Temanggung	5	kegiatan	95.255.000							
2	14	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					206.350.000	146.350.000	38.288.000	37.966.700	99,16	146.350.000		
2	14	02	202	9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarg	Terlaksannnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarg	DPPPAPPKB kab Temanggung			60.000.000	60.000.000	-	-	-	70.000.000		
2	14	02	202	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	29.550.000	29.550.000	-	-	-	29.550.000	DAK	
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	116.800.000	116.800.000	38.288.000	37.966.700	99,16	116.800.000	DAU DAN DAK	
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					6.292.837.000							
2	14	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal					1.175.015.200	848.019.200	1.253.628.000	778.433.204	62	788.019.200		
2	14	03	201	01	Advokasi Program KKBPK kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Kab. Temanggung , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	kegiatan	79.374.800	4.378.800	-	-	-	4.378.800	DAK	

2	14	03	201	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	kegiatan	25.000.000	25.000.000	-	-	-	25.000.000	DAK
2	14	3	2.01	3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPB	Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	-	-	120.690.000	117.424.080	97,29	-	dak
2	14	03	201	04	Promosi dan KIE Program KKBPB Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	kegiatan	70.640.000	70.640.000	-	-	-	70.640.000	DAK

2	14	03	201	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBP Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bulan	312.000.000	312.000.000	-	-	-	312.000.000	DAK
2	14	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bulan	648.000.400	708.000.400	1.253.628.000	778.433.204	62,09	648.000.400	DAK
2	14	03	201	08	Pengendalian Program KKBP	Terlaksananya Pengendalian Program KKBP	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	kegiatan	40.000.000	40.000.000	-	-	-	40.000.000	DAK
2	14	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					1.387.200.000	1.387.200.000	1.417.200.000	1.399.037.250	142	1.399.037.250	

2	14	3	2.02	3	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)/ PENUNJANG DAK	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5	kegiatan	-	30.000.000	12.737.250	42,46	30.000.000	DAU		
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	BULAN	1.387.200.000	1.387.200.000	1.387.200.000	1.386.300.000	99,94	1.387.200.000	DAK	
2	14	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						2.626.621.800	2.672.621.800	3.159.929.000	2.198.812.600	210	2.789.176.860	
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Faskes di kabupaten Temanggung	12	BULAN	13.950.000	13.950.000	67.177.000	41.775.000	62,19	13.950.000	DAK	
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	BULAN	1.540.285.800	1.505.281.800	1.831.035.000	933.899.600	51,00	1.580.285.800	DAU DAN DAK	

2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5	kegiatan	1.059.786.000	1.065.786.000	1.261.717.000	1.223.138.000	96,94	1.182.341.060	DAK FISIK	
2	14	03	203	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Faskes di kabupaten Temanggung	3	kegiatan	12.600.000	12.600.000	-	-	-	12.600.000	DAK	
2	14	3	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						1.104.000.000	1.139.700.000	331.810.300	135.307.500	115	1.159.700.000	
2	14	3	2.04	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	0	-	-	17.110.300	12.968.250	75,79	20.000.000	DAU	
2	14	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64	Kampung KB	1.104.000.000	1.139.700.000	314.700.000	122.339.250	38,87	1.139.700.000	DAK	
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						4.400.040.000	4.015.940.000	297.834.500	281.771.700	291	4.663.040.000	-
2	14	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						4.250.040.000	4.015.940.000	297.834.500	281.771.700	291	4.513.040.000	

2	14	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	lokus stunting kabupaten Temanggung	30	desa	480.000.000	482.900.000	280.000.000	264.250.000	94,38	660.000.000	DAK FISIK
2	14	4	2.01	3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30	desa	-	-	8.536.000	8.347.600	97,79	20.000.000	DAU
2	14	4	2.01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3 kecamatan di kabupaten Temanggung	3	KEG	237.000.000	-	9.298.500	9.174.100	98,66	300.000.000	DAU/M USREN BANG

2	14	04	201	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bulan	3.533.040.000	3.533.040.000	-	-	-	3.533.040.000	DAK
2	14	4	2.01	6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12	bln	-	-	1.268.260.000	620.894.750	48,96	-	DAK
2	14	04	201		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					50.000.000	-	-	-	-	-	
2	14	04	201	14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ LOKUS STUNTING	12	bln	50.000.000	-	-	-	-	-	DAU
2	14	4	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					100.000.000					150.000.000	

2	14	4	2.0 2	2	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	terlaksannnya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25	kegiatan	100.000.000								150.000.000	
								TOTAL			15.872.999.008								

TOTAL DAU : Rp . 4.928.717.008

TOTAL DAK : Rp 10.944.282.000

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi DPPPAPPKB untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan DPPPAPPKB itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan DPPPAPPKB dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2023 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 8.105.117.530 . (77,18) %, realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 1.289.496.000 (98,18) %, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 3.001.272.00/ 24,28 %, realisasi Belanja Modal sebesar 11.550.000 atau 0,88%

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 DPPPAPPKB mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 15.872.999.008,- yang terdiri dari 9 program antara lain program Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan , Program Perlindungan Perempuan , Program Peningkatan Kualitas Keluarga

, Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) , Program Perlindungan Khusus Anak , Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb), Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja DPPPAPPKB Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi DPPPAPPKB dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika menungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 4 Juli 2022

KEPALA DPPPAPPKB

Dra .SRI ENDANG PRAPTANINGSIH.MSi

Pembina Tk.I

NIP. 19660712 199403 2 006